

RINGKASAN BERITA HARI INI

DPRD Minta Pemkab Tidak Lalai Kelengkapan SPK saat Pengerjaan Proyek

SIDOARJO, SUKSES - Jilid Buku Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2023-2028 yang telah selesai disusun dan diserahkan kepada DPRD Sidoarjo, diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pembangunan daerah.

DPRD Sidoarjo meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk tidak lalai dalam melengkapi SPK (Survei, Pengukuran, dan Konstruksi) saat pengerjaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kabupaten.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Sidoarjo, Gus Muhdlor, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (19/6/2023).

Gus Muhdlor mengatakan, SPK merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Tanpa SPK yang lengkap dan akurat, pelaksanaan proyek akan mengalami kendala-kendala yang dapat merugikan anggaran dan kualitas pembangunan.

“Kita harus memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo memiliki SPK yang lengkap dan akurat. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah,” tegas Gus Muhdlor.

DPRD Sidoarjo juga meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Sidoarjo dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

“Kita sebagai DPRD akan terus mengawasi dan mendukung pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo,” pungkas Gus Muhdlor.

PDI Perjuangan Populer di Pemilih Gen Z dan Y Sidoarjo

SIDOARJO - HARIAN BANGSA Hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) yang dilakukan sebelum bulan Mei 2023 di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan persaingan ketat kepopuleran partai politik di pemilih muda atau milenial di Kota Sidoarjo.

Dari 16 partai politik yang diuji (survei populasi) baik partai parlemen maupun non-parlemen, ARCI merekomendasikan Partai Gerindra sebagai partai politik yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan pemilih Gen Z dan Gen Y atau pemilih muda atau milenial berumur 25-35 tahun.

“Mereka mengunggulkan jika PDI Perjuangan dan Partai Golkar tetap menjadi dua partai teratas yang disukai responden muda Kota Sidoarjo,” kata Gus Muhdlor.

Survei ARCI ini dilakukan dengan sampel survei meliputi seluruh warga Sidoarjo di 18 kecamatan yang memiliki hak pilih dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat telepon.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen sampai dibagikan kembali atau spot check dalam quality control. Waktu wawancara lapangan dilakukan sejak 27 Mei hingga 4 Juni 2023.

Selain itu, Survei juga menyoroti, perubahan sikap menggunakan media online menjadi rujukan Gen Z dan Y dalam memilih informasi. Ini adalah tren yang perlu diperhatikan.

Survei ARCI ini dilakukan dengan populasi survei meliputi seluruh warga Sidoarjo di 18 kecamatan yang memiliki hak pilih dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat telepon.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen sampai dibagikan kembali atau spot check dalam quality control. Waktu wawancara lapangan dilakukan sejak 27 Mei hingga 4 Juni 2023.

Selain itu, Survei juga menyoroti, perubahan sikap menggunakan media online menjadi rujukan Gen Z dan Y dalam memilih informasi. Ini adalah tren yang perlu diperhatikan.

Dinobatkan Sebagai Pemimpin Populer, Jadi Motivasi bagi Gus Muhdlor

KOTA BUNDA Sidoarjo Ahmad Muhdlor diobatkan sebagai pemimpin populer di kalangan pemilih muda atau milenial di Kota Sidoarjo. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) sebelum bulan Mei 2023.

Gus Muhdlor merasa sangat bangga dan termotivasi oleh hasil survei tersebut. “Ini adalah penghargaan yang sangat berharga bagi saya sebagai pemimpin daerah,” ujarnya.

Survei tersebut menunjukkan bahwa Gus Muhdlor memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan pemilih muda atau milenial di Kota Sidoarjo. Hal ini merupakan motivasi yang sangat besar bagi Gus Muhdlor untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

“Saya akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” tegas Gus Muhdlor.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa Gus Muhdlor memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di kalangan pemilih muda atau milenial di Kota Sidoarjo. Hal ini merupakan motivasi yang sangat besar bagi Gus Muhdlor untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

“Saya akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,” tegas Gus Muhdlor.

Kesehatan Lingkungan Jadi Penyebab Stunting Sidoarjo Naik

SIDOARJO, BIRAWA Sisaat kabupaten/kota di Jatim berlomba-lomba menurunkan stunting, justru jumlah stunting di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan. Angka stunting pada 2023 ini, jauh melampaui naik menjadi 16,3 persen. Sedangkan pada 2022 lalu sebesar 14,3 persen.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Dr. H. Nur Hafid, dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Senin (19/6/2023).

Dr. Hafid mengatakan, peningkatan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesehatan lingkungan yang buruk.

“Kondisi lingkungan yang buruk, seperti air minum yang tidak layak minum, sanitasi yang buruk, dan limbah yang tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang dapat meningkatkan angka stunting,” tegas Dr. Hafid.

Dr. Hafid juga meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan upaya-upaya untuk memperbaiki kesehatan lingkungan di Kabupaten Sidoarjo.

“Kita harus memastikan bahwa setiap warga masyarakat di Kabupaten Sidoarjo memiliki akses yang layak terhadap air minum yang layak minum, sanitasi yang baik, dan limbah yang dikelola dengan baik,” tegas Dr. Hafid.

Tandatangani Rekomitmen, Gus Muhdlor Siap Selesaikan TLRHP

KOTA-ENAM kepala daerah di Jawa Timur menandatangani rekomitmen penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Jawa Timur. Salah satunya Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Penandatanganan dilakukan di kantor Wali Kota Surabaya Elistianto Daryadi secara virtual.

Survei ARCI ini dilakukan dengan populasi survei meliputi seluruh warga Sidoarjo di 18 kecamatan yang memiliki hak pilih dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat telepon.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen sampai dibagikan kembali atau spot check dalam quality control. Waktu wawancara lapangan dilakukan sejak 27 Mei hingga 4 Juni 2023.

Selain itu, Survei juga menyoroti, perubahan sikap menggunakan media online menjadi rujukan Gen Z dan Y dalam memilih informasi. Ini adalah tren yang perlu diperhatikan.

Survei ARCI ini dilakukan dengan populasi survei meliputi seluruh warga Sidoarjo di 18 kecamatan yang memiliki hak pilih dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat telepon.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen sampai dibagikan kembali atau spot check dalam quality control. Waktu wawancara lapangan dilakukan sejak 27 Mei hingga 4 Juni 2023.

Selain itu, Survei juga menyoroti, perubahan sikap menggunakan media online menjadi rujukan Gen Z dan Y dalam memilih informasi. Ini adalah tren yang perlu diperhatikan.

Pembangunan 2022 Sesuai Harapan, Ada Catatan dari Fraksi

KOTA-DALAM rapat paripurna membahas LKJP APBD 2022, fraksi-fraksi berkesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Juru bicara Fraksi Gerindra Anang Siswandoko menyampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah pada 2022 telah sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

“Pemerintah daerah juga dinilai telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tegas Anang Siswandoko.

Anang Siswandoko juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Sidoarjo dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

“Kita sebagai DPRD akan terus mengawasi dan mendukung pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo,” pungkas Anang Siswandoko.

PDIP dan Golkar Pilihan Anak Muda Sidoarjo

SIDOARJO, SUKSES - Jilid Buku Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2023-2028 yang telah selesai disusun dan diserahkan kepada DPRD Sidoarjo, diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pembangunan daerah.

DPRD Sidoarjo meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk tidak lalai dalam melengkapi SPK (Survei, Pengukuran, dan Konstruksi) saat pengerjaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kabupaten.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Sidoarjo, Gus Muhdlor, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (19/6/2023).

Gus Muhdlor mengatakan, SPK merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Tanpa SPK yang lengkap dan akurat, pelaksanaan proyek akan mengalami kendala-kendala yang dapat merugikan anggaran dan kualitas pembangunan.

“Kita harus memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo memiliki SPK yang lengkap dan akurat. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah,” tegas Gus Muhdlor.

DPRD Sidoarjo juga meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Sidoarjo dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

“Kita sebagai DPRD akan terus mengawasi dan mendukung pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo,” pungkas Gus Muhdlor.

Cegah Penyebaran Penyakit, Cek Hewan Kurban

SIDOARJO, SUKSES - Jilid Buku Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2023-2028 yang telah selesai disusun dan diserahkan kepada DPRD Sidoarjo, diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pembangunan daerah.

DPRD Sidoarjo meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk tidak lalai dalam melengkapi SPK (Survei, Pengukuran, dan Konstruksi) saat pengerjaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kabupaten.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Sidoarjo, Gus Muhdlor, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (19/6/2023).

Gus Muhdlor mengatakan, SPK merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Tanpa SPK yang lengkap dan akurat, pelaksanaan proyek akan mengalami kendala-kendala yang dapat merugikan anggaran dan kualitas pembangunan.

“Kita harus memastikan bahwa setiap proyek yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo memiliki SPK yang lengkap dan akurat. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah,” tegas Gus Muhdlor.

DPRD Sidoarjo juga meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan DPRD Sidoarjo dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

“Kita sebagai DPRD akan terus mengawasi dan mendukung pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo,” pungkas Gus Muhdlor.

Keluarga Prasejahtera Dipastikan Terima Bantuan Perlindungan Sosial

SIDOARJO, MEMORANDUM Bupati Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor mengemukakan keprihatinannya saat menerima laporan ada keluarga prasejahtera yang belum dapat menerima bantuan perlindungan sosial.

Padahal bantuan-bantuan rutin menerima bantuan dari pemerintah. Menyikap hal itu bupati mengemukakan janji Gus Muhdlor memastikan kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk melapor ke Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo apabila mendapati ada keluarga yang membutuhkan bantuan.

Rasa prihatin itu disampaikan Gus Muhdlor di sela-sela menyambatkan bantuan pangan beras pemerintah (CBP) tahun 2023 tahap 3 di lima desa Kecamatan Tunggulrejo, Kamis (15/6).

Kelima desa itu yakni Desa Ngubun, Desa Kaliterah, Desa Kalipurno, Desa Kedarsan, dan Desa Kludun.

Menurut Gus Muhdlor bantuan dari pemerintah sangat diharapkan keluarga prasejahtera.

Seperi bantuan program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan nonpangan (BPNT).

Hari Ini Berangkatkan Dua Kloter Haji Terahir dari Sidoarjo

KOTA-HARI ini, pemberangkatan jamaah haji dari Sidoarjo akan dilaksanakan di Pendopo Delta Wibawa. Yaitu dari kloter 75 dan 76. Masing-masing kloter terdiri dari 445 jamaah. Sehingga totalnya ada 890 jamaah haji yang akan diberangkatkan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo Arwani mengatakan, dalam pemberangkatan kali ini, jamaah haji masuk dalam gelombang 2 Artinya langsung turun di Jeddah. Sedangkan yang gelombang 1 turun di Madinah, ujarnya.

Dia juga memastikan bahwa tidak ada yang belum selesai hingga saat ini. Meskipun pada awalnya terdapat beberapa kendala terkait visa, namun semua masalah tersebut telah berhasil diatasi.

“Kita sebagai pemerintah daerah akan terus mendukung dan memastikan bahwa setiap jamaah haji yang berangkat dari Sidoarjo dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Meski sempat mengalami kendala terkait visa, tetapi semua jamaah telah berhasil menyelesaikan persyaratan tersebut dan siap untuk berangkat ke Tanah Suci,” imbuhnya.

Menurut dia, pemberangkatan jamaah haji merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh jamaah. Mereka telah menjalani persiapan dan pelatihan selama beberapa waktu untuk menjalankan ibadah haji dengan baik. Selain itu, pemerintah daerah Sidoarjo juga

TANDA TANGANI - Para kepala daerah siap menandatangani rekomitmen penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Jawa Timur.

Penandatanganan dilakukan di kantor Wali Kota Surabaya Elistianto Daryadi secara virtual.

Survei ARCI ini dilakukan dengan populasi survei meliputi seluruh warga Sidoarjo di 18 kecamatan yang memiliki hak pilih dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat telepon.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen sampai dibagikan kembali atau spot check dalam quality control. Waktu wawancara lapangan dilakukan sejak 27 Mei hingga 4 Juni 2023.

Selain itu, Survei juga menyoroti, perubahan sikap menggunakan media online menjadi rujukan Gen Z dan Y dalam memilih informasi. Ini adalah tren yang perlu diperhatikan.

Survei ARCI ini dilakukan dengan populasi survei meliputi seluruh warga Sidoarjo di 18 kecamatan yang memiliki hak pilih dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat telepon.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen sampai dibagikan kembali atau spot check dalam quality control. Waktu wawancara lapangan dilakukan sejak 27 Mei hingga 4 Juni 2023.

Selain itu, Survei juga menyoroti, perubahan sikap menggunakan media online menjadi rujukan Gen Z dan Y dalam memilih informasi. Ini adalah tren yang perlu diperhatikan.

Tanda Tangani Rekomitmen Penyelesaian TLRHP BPK

SIDOARJO, SUKSES - Bupati enam kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) menandatangani rekomitmen penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Jawa Timur. Salah satunya Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Penandatanganan dilakukan di kantor Wali Kota Surabaya Elistianto Daryadi secara virtual.

Survei ARCI ini dilakukan dengan populasi survei meliputi seluruh warga Sidoarjo di 18 kecamatan yang memiliki hak pilih dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat telepon.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen sampai dibagikan kembali atau spot check dalam quality control. Waktu wawancara lapangan dilakukan sejak 27 Mei hingga 4 Juni 2023.

Selain itu, Survei juga menyoroti, perubahan sikap menggunakan media online menjadi rujukan Gen Z dan Y dalam memilih informasi. Ini adalah tren yang perlu diperhatikan.

Survei ARCI ini dilakukan dengan populasi survei meliputi seluruh warga Sidoarjo di 18 kecamatan yang memiliki hak pilih dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat telepon.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen sampai dibagikan kembali atau spot check dalam quality control. Waktu wawancara lapangan dilakukan sejak 27 Mei hingga 4 Juni 2023.

Selain itu, Survei juga menyoroti, perubahan sikap menggunakan media online menjadi rujukan Gen Z dan Y dalam memilih informasi. Ini adalah tren yang perlu diperhatikan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Minta Pemkab Tidak Lalai Kelengkapan SPK saat Pengerjaan Proyek

Sidoarjo, Memorandum

Sial dialami kontraktor Sidoarjo H Beni Siswanto. Mantan ASN (aparatur sipil negara) pemkab dan mantan Kades Bluru Kidul yang kini juga aktif di DPC parpol besar itu harus gigit jari.

Hal tersebut karena proyek penunjukkan langsung (PL) pemeliharaan pos jaga pendopo senilai Rp 30 juta yang digarapnya awal 2021 lalu belum dibayar sampai sekarang.



Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo H Suyarno

Siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran proyek itu? Faktanya sampai Juni 2023 uang proyek itu belum mencair dan Beni masih terus berjuang agar proyeknya dibayar pemerintah. "Saya dijanjikan terus sejak 2021. Tapi sampai sekarang belum dibayar," ujar Beni kepada *Memorandum*, Senin (5/6).



Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo H Anang Siswandoko

Mantan ASN Bagian Rumah Tangga Pemkab Sidoarjo ini mengisahkan panjang lebar seputar masalah tersebut. Berawal ketika pendopo bakal punya gawe karena 26 Februari 2021 ada pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Kala itu Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan dijabat Aan.



Kontraktor H Beni Siswanto

Sebelum pelantikan ia diminta Aan untuk menggarap proyek pemeliharaan rutin pos penjagaan pendopo kabupaten senilai Rp 30 juta. Janjinya bakal dicairkan saat PAK. Singkat cerita, kata Beni, proyek penunjukan langsung Rp 30 juta itu tuntas seminggu sebelum pelantikan bupati dan wakil bupati.

Sebelum proyek itu cair, tepatnya sebelum PAK, Aan digeser ke DLHK (dinas lingkungan hidup dan kebersihan). Sebagai gan-

tinya, Yudi Irianto. Beni kemudian menanyakan anggaran proyek itu ke Yudi.

"Awalnya Yudi bilang anggaran PAK habis. Dia berjanji cair tahun depan (2022)," papar Beni Siswanto.

Namun, lanjut Beni, tahun 2022 belum bisa cair karena ada pandemi Covid-19. Setiap ditagih, Yudi selalu berjanji dan berjanji terus. "Saya dijanjikan terus. *WhatsApp* (WA) Yudi saya simpan. Ini WAdan Yudi," jelasnya seraya menunjukkan bukti dari Yudi Irianto selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pemkab Sidoarjo.

Selain lewat WA, menurut Beni, secara lisan Yudi juga berjanji akan membayar proyek itu. "Dia bilang dimumutkan perawatan pendopo. Namun sampai sekarang nol. Hanya janji-janji saja.

Faktanya proyek itu belum dibayar pemkab hingga 2 tahun ini," tandas Beni. Sementara Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo H Suyarno SH MH menanggapi masalah ini, Suyarno mendesak pemkab segera membayar anggaran proyek pemeliharaan Pos Jaga Pendopo Kabupaten Sidoarjo itu.

"Tidak ada alasan untuk tidak membayarnya. Kasihan rekanan yang telat anjur menggarap," pinta Suyarno. Suyarno menambahkan, tanpa perintah dari pemkab, tidak mungkin rekanan menggarap proyek dari pemkab. Apalagi yang digarap pos penjagaan pendopo kabupaten. "Tanpa perintah dari pemkab, tidak mungkin rekanan menggarap proyek pendopo, jadi su-

dah menjadi kewajiban pemkab untuk membayarnya karena faktanya proyek sudah digarap," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu. Komentar senada dilontarkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo H Anang Siswandoko. Politisi Partai Gerindra itu juga mendesak agar pemkab membayar rekanan yang sudah menggarap proyek itu. "Nanti kita agendakan *hearing* untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita mediasi agar ada titik temu di antara kedua belah pihak," ujar politisi yang dikenal vokal mengkritisi Pemkab Sidoarjo.

Kalau tidak ada titik temu, Anang meminta agar proyek yang sudah digarap rekanan dan belum dibayar pemkab agar segera dibongkar. "Ini sebagai pembelajaran agar tidak ada kejadian serupa di kemudian hari. Kasihan rekanan kalau diperlakukan seperti itu. Sudah setengah mati menggarap proyek sampai 2 tahun belum dibayar," tegas Anang.

Sebelum dibongkar, masih kata Anang, rekanan bisa mensosiasi pemkab. Memberi tenggang waktu agar segera membayar proyek itu. "Kalau masih belum dibayar, ya dibongkar



Komis C DPRD Sidoarjo sidak pos jaga pendopo kabupaten.

saja proyek tersebut," tuturnya. Ramei kabar ada proyek senilai Rp 30 juta tidak dibayar, sebelumnya sudah dibantah Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Sidoarjo Yudi Irianto. Klarifikasi ini sudah dimuat di sejumlah media massa belum lama ini.

Dalam klarifikasinya kepada wartawan, Yudi mengatakan sebelumnya sejak awal ia tidak tahu masalah masalah ini. Kontrak teknisnya seperti apa, ia juga tidak tahu. Itu terjadi, menurut Yudi kepada wartawan dugaannya ketika pejabat sebelum dirinya.

"Ketika saya menjabat di situ, tahu-tahu ada Pak Beni menemui saya mengklarifikasi terkait pekerjaan pemeliharaan pos jaga pendopo kabupaten belum dibayar. Ini kan aneh," ungkap Yudi, Rabu (24/5).

Rekanan tersebut lalu diminta menunjukkan bukti-bukti apa yang dimilikinya. Namun tidak bisa menunjukkan bukti-bukti perintah pekerjaan proyek penunjukkan langsung (PL) tersebut.

"Saya sampaikan kita-kita punya bukti apa yang berkaitan dengan pekerjaan itu ada atau tidak. Jika tidak

ada bagaimana saya harus bertanggungjawabkan hal itu," ungkap Yudi yang baru menjabat pada 1 Juli 2021.

Berdasarkan hasil investigasi, diketahui pemeliharaan pos jaga di pendopo kabupaten dikerjakan awal tahun 2021. Sebelum Yudi menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, pejabat lama ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek (PP) Beni Siswanto. "Saya Suyarno dan Anang kepada *Memorandum*.

Dewan berbaris mediasi itu ditentikan titik temu sehingga kejadian tidak ada yang dirugikan baik pemkab maupun rekanan. Ke depan, agar kejadian serupa tidak terulang, pemkab diminta tidak lalai dengan kelengkapan SPK (suat perintah kerja) saat penggarapan proyek.

"SPK itu penting dan harus ada. Biar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Jangan lagi ada rekanan yang menggarap proyek di lingkungan Pemkab Sidoarjo tetapi tidak dibayar hingga bertahun-tahun. Kasihan rekanan bila kejadian seperti ini terulang," pinta Suyarno dan Anang.

Memasuki meminta pemkab tidak lalai lagi soal SPK sebelum proyek digarap. Setiap proyek di lingkungan pemkab harus dilengkapi SPK. "Ini pelajaran berharga dan ke-depan tidak boleh terjadi lagi di Sidoarjo," tegas keduanya. (adri/keji/ku/nov)

ada bagaimana saya harus bertanggungjawabkan hal itu," ungkap Yudi yang baru menjabat pada 1 Juli 2021.

Berdasarkan hasil investigasi, diketahui pemeliharaan pos jaga di pendopo kabupaten dikerjakan awal tahun 2021. Sebelum Yudi menjabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, pejabat lama ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek (PP) Beni Siswanto. "Saya Suyarno dan Anang kepada *Memorandum*.

Dewan berbaris mediasi itu ditentikan titik temu sehingga kejadian tidak ada yang dirugikan baik pemkab maupun rekanan. Ke depan, agar kejadian serupa tidak terulang, pemkab diminta tidak lalai dengan kelengkapan SPK (suat perintah kerja) saat penggarapan proyek.

"SPK itu penting dan harus ada. Biar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Jangan lagi ada rekanan yang menggarap proyek di lingkungan Pemkab Sidoarjo tetapi tidak dibayar hingga bertahun-tahun. Kasihan rekanan bila kejadian seperti ini terulang," pinta Suyarno dan Anang.

Memasuki meminta pemkab tidak lalai lagi soal SPK sebelum proyek digarap. Setiap proyek di lingkungan pemkab harus dilengkapi SPK. "Ini pelajaran berharga dan ke-depan tidak boleh terjadi lagi di Sidoarjo," tegas keduanya. (adri/keji/ku/nov)



Pos jaga pendopo Kabupaten Sidoarjo.

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

PDI Perjuangan Populer di Pemilih Gen Z dan Y Sidoarjo

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) yang dilakukan selama bulan Mei-Juni 2023 di Kabupaten Sidoarjo menemukan persaingan ketat kepopuleran partai politik di pemilih pemula atau Generasi Z, dan pemilih muda atau milenial atau Generasi Y di Kota Delta.

Dari 16 partai politik yang diuji (survei popularitas) baik partai parlemen maupun non-parlemen. ARCI merekam dua partai politik, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar menjadi dua partai teratas yang memiliki tingkat popularitas di kalangan pemilih Gen Z dan Gen Y Kabupaten Sidoarjo menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Direktur Lembaga Survei ARCI Baihaki Siradj mengatakan, di Pemilu 2024 pemilih pemula atau Gen Z dan Milenial atau Gen Y menjadi primadona sasaran partai politik untuk meraup suara di pileg, pilpres, serta pilkada.

"Saat kami lakukan survei pemilihan partai politik berdasarkan demografi, responden

berumur 17-21 tahun atau Generasi Z di Kabupaten Sidoarjo ada lima Partai teratas yang mereka pilih," kata Baihaki.

PDI Perjuangan dan Partai Golkar jadi partai teratas responden pemilih pemula. PDI Perjuangan dengan persentase 19,4 persen. Kemudian di peringkat kedua ada Partai Golkar dengan 17,6 persen. Di peringkat ketiga ada PKB dengan 13,2 persen. Kemudian Partai Demokrat di posisi keempat dengan 9,6 persen, dan di peringkat kelima Partai Gerindra dengan persentase 7,2 persen.

Sementara untuk responden Gen Y atau pemilih muda atau milenial berumur 22-25 tahun, Baihaki mengungkapkan jika PDI Perjuangan dan Partai Golkar tetap menjadi dua partai teratas yang disukai responden muda Kota Delta.

"Saat kami lakukan survei Partai Politik di responden berumur 22-25 tahun, mereka memilih PDI Perjuangan dengan 15,1 persen, Partai Golkar 13,1 persen, di peringkat ketiga ada PKB dengan 12,1 persen. Kemudian

yang menarik adalah perolehan sama presentase antara Partai Nasdem dan Demokrat yang sama-sama diangka 9,09 persen," ungkap Baihaki.

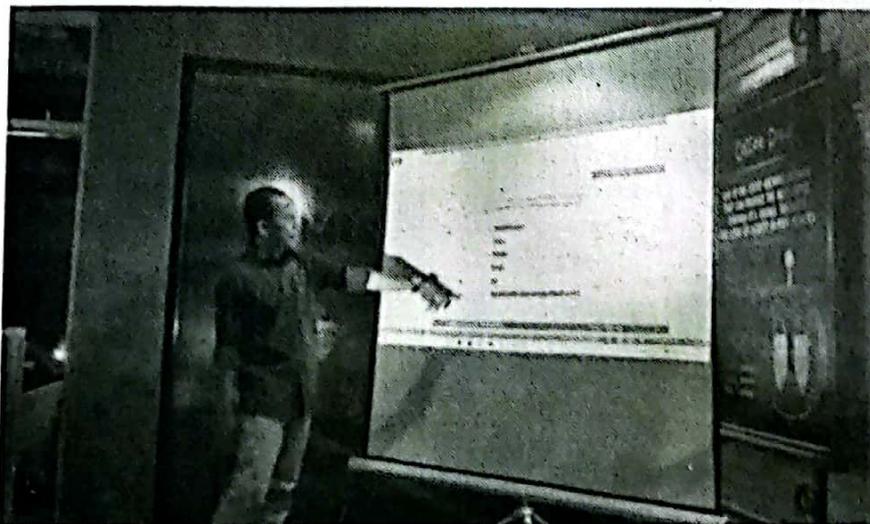
Baihaki memaparkan jika relatif pengenalan terhadap Partai ke masyarakat di dalam kontestasi Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Sidoarjo dilakukan baik oleh pengurus PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Sehingga di kalangan Gen Z dan Y dua partai ini memiliki popularitas yang berjarak tipis.

"Media sosial (Medsos) dan pemberitaan di media massa, utamanya yang bisa langsung dikonsumsi oleh Gen Z dan Y (media online) menjadi rujukan Gen Z dan Y dalam mencari informasi kepartaian dan sosok tokoh politiknya," jelas Baihaki.

Lebih jauh Baihaki memaparkan jika tak kalah penting adalah sosok pengerak di dalam partai. Di PDI Perjuangan Sidoarjo, ada sosok Samsul Hadi yang rajin mengunggah kegiatan pribadi kepartaiannya dan menyosialisasikan kegiatan PDI Perjuangan di medsos maupun di media massa.

Sementara di Partai Golkar Sidoarjo, ada ketuanya Adam Rusydi. Mereka berdua mampu merepresentasikan kesuksesan sosok anak muda di kepemimpinan partai.

Survei ARCI ini dilakukan dengan populasi survei meliputi seluruh warga Sidoarjo di 18 kecamatan yang sudah memiliki hak pilih dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh Surveyer ARCI. (cat/rd)



Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) melakukan survei di Sidoarjo.

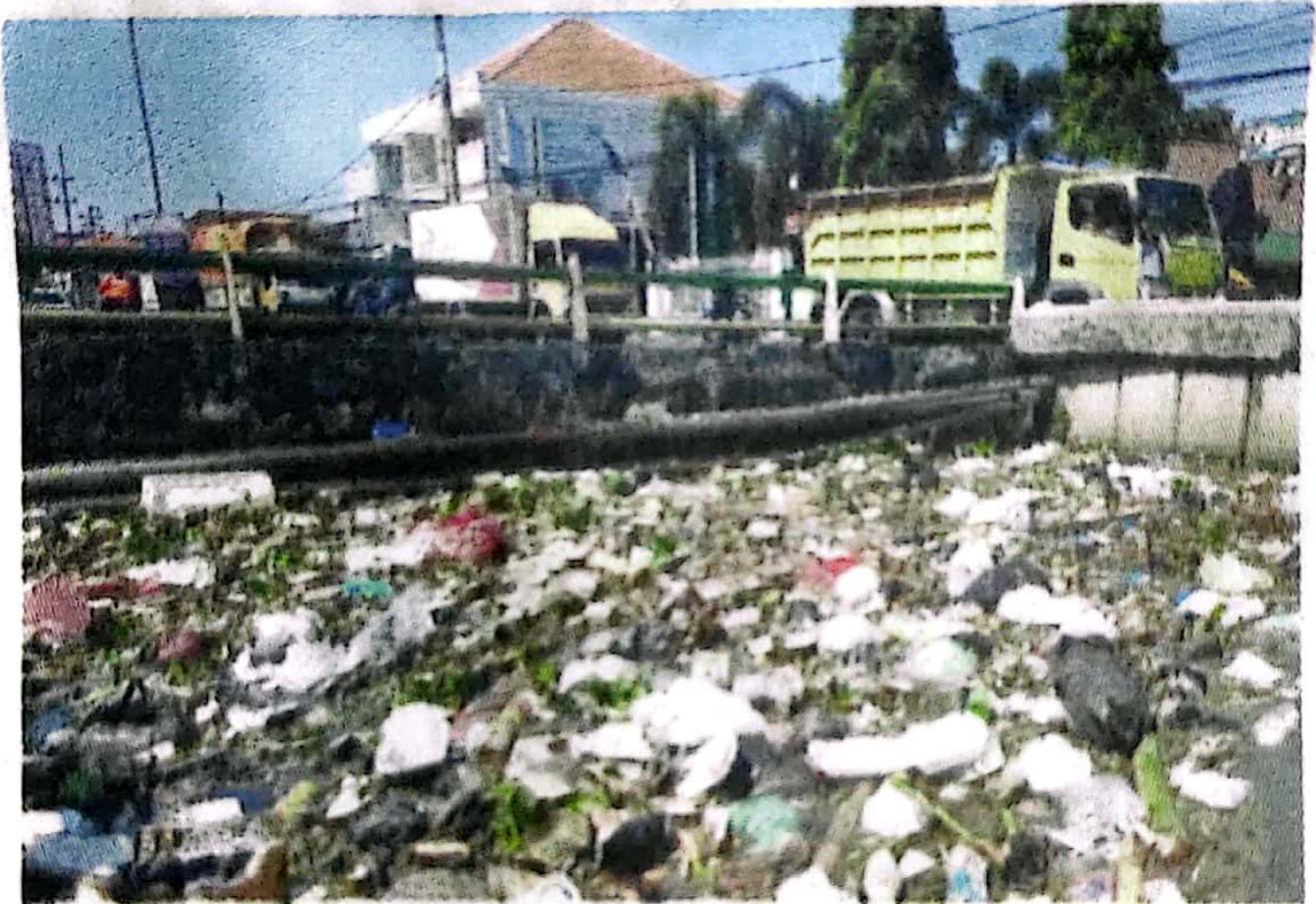
Kesehatan Lingkungan jadi Penyebab Stunting Sidoarjo Naik

Sidoarjo, Bhirawa

Disaat kabupaten/kota di Jatim berlomba-lomba menurunkan stunting, justru jumlah stunting di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan. Angka

sementara pada 2023 ini, jumlahnya naik menjadi 16,3 persen. Sedangkan pada 2022 lalu sebesar 14,3 persen.

▶▶ ke halaman 11



allkusyanto/bhirawa.

Warga di Kabupaten Sidoarjo masih suka membuang sampah dan BAB, pada sungai yang mengalir di wilayah kabupaten padat penduduk ini.

Kesehatan Lingkungan jadi Penyebab Stunting Sidoarjo Naik

● Sambungan hal 1

Pemkab Sidoarjo saat ini terus gencar-gencarnya, minta dukungan kepada semua kalangan masyarakat, untuk bahu-membahu agar angka kasus stunting ini bisa dicegah dan diturunkan. Menurut Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, MShofa SKM MKes, proses terjadinya kasus stunting itu panjang. Karena kejadiannya, tidak hanya setelah anak dilahirkan saja, tetapi malah sudah dimulai saat sang calon ibu masih belum menikah.

“Kalau ibunya juga kurang gizi,

kurang sehat, kurang darah, anak yang dilahirkan, juga bisa dimungkinkan mengalami stunting,” jelasnya kepada petugas klinik kesehatan di Kabupaten Sidoarjo, saat kegiatan mewaspadai penyakit potensial wabah, yang digelar Dinkes Kabupaten Sidoarjo, belum lama ini.

Sang calon ibu, menurutnya harus sehat saat remaja atau saat sekolah. Karena mereka rawan, mengalami anemia atau kehilangan darah. Karena remaja putri, rutin kehilangan darah atau mengalami menstruasi dalam kurun waktu tertentu.

“Sebelum menikah, para calon pengantin perempuan, juga harus rutin

kontrol ke Puskesmas. Agar tahu kondisi kesehatannya,” kata Shofa.

Tidak berhenti sampai disitu, lanjut Shofa, sebab saat punya anak, para ibu-ibu juga harus bisa memberikan ASI yang eksklusif. Kemudian, juga jangan sampai salah dalam pola asuh anak. Para ibu, harus bisa memberikan makanan yang sehat dan bergizi kepada bayinya. “Makanan sehat dan bergizi itu tidak mesti mahal,” ujarnya.

Kesehatan lingkungan, lanjut Shofa, juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadi kasus stunting. Di Kabupaten Sidoarjo saat ini dinilai masih banyak terjadi BAB atau buang air besar yang

masih sembarangan. Sehingga angka ODF atau open defecation free atau bebas buang air besar sembarangan di Kabupaten Sidoarjo hanya sebesar 52 persen saja. Desa-desa di Kabupaten Sidoarjo yang belum ODF masih ada sebesar 48 persen. “Menuju Sidoarjo yang ODF ini, menjadi pekerjaan rumah kita bersama-sama,” katanya.

Shofa sempat menyebut di wilayah Kecamatan Waru, wilayah yang berbatasan dengan Kota Surabaya, ternyata masih banyak desa yang belum ODF. Disana, banyak rumah-rumah warga yang memang sudah ada jamban, namun kotorannya tetap disalurkan ke sungai. [kus.iib]

HARIAN
Bhirawa

Wala Sidal Bhir Wedad



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

■ DISKOMINFO



SELAMAT: Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo Didik Tri Wahyudi (kanan) menerima penghargaan mewakili Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor.

Dinobatkan Sebagai Pemimpin Populer, Jadi Motivasi bagi Gus Muhdlor

KOTA-Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dinobatkan sebagai pemimpin terpopuler di Media Pemberitaan Online dalam ajang The 1st INDONESIA GPR AWARDS (IGA) 2023 di Hotel Clora Makassar, Jumat (16/6). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Humas Indonesia.

Award diterima oleh plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Didik Tri Wahyudi mewakili Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Hadir dalam acara itu puluhan lembaga atau instansi pemerintah dan corporate.

Dalam kompetisi tersebut, pemilihan kategori terpopuler di Media Pemberitaan Online bagi pemimpin melalui proses media monitoring dengan menggandeng NoLimit.

Yakni sebuah perusahaan media monitoring terkemuka. Berdasarkan hasil monitoring secara kuantitatif dan melalui analisis kualitatif tim Humas Indonesia, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor berhasil keluar sebagai Pemimpin Terpopuler di Media Pemberitaan Online 2023.

● Ke Halaman 10

Dinobatkan Sebagai...

Founder sekaligus CEO Humas Indonesia Asmono Wikan menyampaikan, selama lebih dari dua bulan, sejumlah korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berkompetisi di ajang IGA 2023. "Terdapat tiga kategori yang dipertandingkan, mulai dari kategori Humas Pemerintah Terbaik, Lembaga Humas Pemerintah Terbaik, dan Program Kehumasan Pemerintah Terbaik," ujarnya.

Penjurian IGA 2023 berlangsung dalam dua tahap, penyisihan dan babak presentasi. Dewan juri memutuskan 61 entri lolos dari babak penyisihan. Selanjutnya, mereka mengikuti babak presentasi yang diselenggarakan secara hibrida selama dua hari berturut-turut dari tanggal 3 hingga 4 Mei dengan melibatkan lima orang juri.

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo Didik Tri Wahyudi menyambut baik apresiasi dari

Humas Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu dinilai sebagai sosok pemimpin yang populer, sepak terjangnya mendominasi di pemberitaan media online.

"Apresiasi juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang menjadi mitra kerja Diskominfo yang perannya sangat membantu dalam publikasi kegiatan Pemkab Sidoarjo," kata Didik. (nis/vga)

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Raih The 1st Indonesia GPR Awards 2023

Versi Humas Indonesia

Sidoarjo, Memo X

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali dinobatkan sebagai pemimpin terpopuler di Media Pemberitaan Online dalam ajang The 1st INDONESIA GPR AWARDS (IGA) 2023 di Hotel Clora, Makassar, Jum'at (16/06/2023) malam. Acara ini diselenggarakan oleh Humas Indonesia. Award diterima Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Sidoarjo, Didik Tri Wahyudi yang mewakili Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. Hadir dalam acara itu puluhan lembaga/instansi pemerintah dan sejumlah corporate.

Kompetisi IGA 2023 pemilihan kategori terpopuler di Media Pemberitaan Online bagi pemimpin melalui proses media monitoring dengan menggunakan NoLimit. Yakni sebuah perusahaan media monitoring terkemuka. Berdasarkan hasil monitoring secara kuantitatif dan melalui analisis kualitatif tim Humas Indonesia.

"Kami menetapkan Bapak Ahmad Muhdlor, Bupati Sidoarjo sebagai Pemenang Pemimpin Terpopuler di Media Pemberitaan Online 2023," ujar Asmono Wikan Founder sekaligus CEO Humas Indonesia, Jumat (16/06/2023) malam.

Asmono Wikan juga menjelaskan selama lebih dari dua bulan, sejumlah korporasi, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah berkompetisi di ajang IGA 2023. "Terdapat tiga kategori yang dipertandingkan. Yakni dari kategori Humas Pemerintah Terbaik, Lembaga Humas Pemerintah Terbaik dan Program Kehumasan Pemerintah Terbaik," ungkap Asmono Wikan.

Penjurian IGA 2023 berlangsung dalam dua tahap, yakni babak penyisihan dan babak presentasi. Dewan juri memutuskan 61 entri lolos dari babak penyisihan.

"Selanjutnya, mereka mengikuti babak presentasi yang

diselenggarakan secara hibrida selama dua hari berturut-turut dari tanggal 3 - 4 Mei 2023 dengan melibatkan lima orang juri," tegas Asmono Wikan.

Para juri ini diantaranya Asmono Wikan (Founder dan CEO PR INDONESIA Group), Emilia Bassar (CEO Center for Public Relations, Outreach and Communication), Jojo Suharjo Nugroho (Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations (APPRI)), Maria Wongsonagoro (PR Consultant) dan Janette Maria Pinariya (Wakil Rektor 1 LSPR).

Sementara Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Sidoarjo, Didik Tri Wahyudi menyambut baik apresiasi dari Humas Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali itu.

"Bupati Gus Muhdlor dinilai Humas Indonesia sebagai sosok pemimpin yang populer. Bahkan sekap terjangnya mendominasi di pemberitaan media online.



NOBATKAN - Plt Kepala Dinas Kominfo Pemkab Sidoarjo, Didik Tri Wahyudi menerima penghargaan Bupati Sidoarjo sebagai pemimpin terpopuler di Media Pemberitaan Online dalam ajang The 1st INDONESIA GPR AWARDS (IGA) 2023 di Hotel Clora, Makassar, Jumat (16/06/2023) malam.

Apresiasi juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang menjadi mitra kerja Diskominfo yang perannya sangat membantu dalam publikasi kegiatan Pemkab Sidoarjo," papar Didik.

Kategori kabupaten/kota hanya Bupati Sidoarjo yang menerima penghargaan. Untuk kategori pemerintah provinsi diantaranya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Gu-

bernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah corporate lainnya. (par/wan)

MEMO X



TANDA TANGAN - Para kepala daerah saat menandatangani rekomitmen penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Jawa Timur

Tanda Tangan Rekomitmen Penyelesaian TLRHP BPK

SIDOARJO, SURYA - Sebanyak enam kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) menandatangani rekomitmen penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim.

Termasuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Walikota Surabaya, Bupati Lamongan, Bupati Sumenep, Bupati Sampang, dan Plt Bupati Bangkalan.

Penandatanganan dilakukan di kantor Wali Kota Surabaya disaksikan Kepala Kantor Perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak serta Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, Jumat (16/6).

Gus Muhdlor mengaku siap melakukan penyelesaian TLRHP seratus persen. Ia akan meminta bimbingan dan arahan BPK Jatim. Dengan begitu diharapkan ada kemudahan dalam menindaklanjuti hasil temuan yang disampaikan BPK Jatim.

"Penandatanganan ini sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab kita bersama dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah," kata Gus Muhdlor.

Menurut dia, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD wajib ditindaklanjuti. Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mempertahankan opini WTP.

Kemarin sudah kesepuluh kalinya secara berturut-turut Kabupaten Si-

doarjo meraih WTP. Oleh karenanya komitmen itu akan terus dijaganya. Caranya dengan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

"Rekomitmen ini perlu untuk mengingatkan kita sebagai pimpinan daerah akan pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK," tandasnya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menambahkan, BPK Jatim menyebut masih ada 76 tunggakan di Pemkot Surabaya yang belum diselesaikan. Atas tunggakan ini, Eri Cahyadi menargetkan tuntas 2023 ini.

"Masih ada tunggakan sejumlah 76 Surabaya, itu yang dari tahun 2004-2005. Insyaallah sudah kita

selesaikan juga didampingi dengan BPK. Semoga tahun ini selesai semua jadi 100 persen," kata Eri Cahyadi.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menjelaskan alasan tunggakan tersebut belum diselesaikan. Menurutnya, ada beberapa tunggakan yang berasal dari wajib pajak.

Namun sebelum tunggakan tersebut diselesaikan, wajib pajak yang bersangkutan telah meninggal.

"Kan tidak mungkin, saya menagih (wajib pajak). Seperti yang disampaikan tadi, itu bisa dihapus. Nah, cara-cara penghapusan, tahapannya kita didampingi BPK," kata Cak Eri. (uif/bob)

SURYA

PDIP dan Golkar Pilihan Anak Muda Sidoarjo

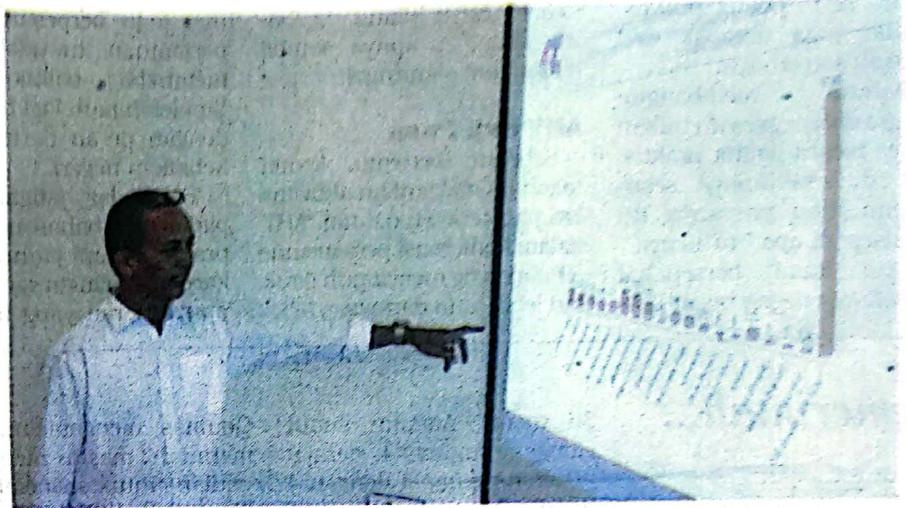
SIDOARJO, SURYA - Jika Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jatim Deni Wicaksono mengatakan, internal partainya sudah memiliki tim khusus yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan relawan, tentu sudah dipikirkan langkah untuk menarik suara dari anak muda. Suara pemilih pemula menjadi salah satu kekuatan dalam pilpres.

Kekuatan pemilih pemula yang sudah ditangkap oleh Darmadi, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Malang, pada acara Deklarasi Bestie Ganjar di Kabupaten Malang menunjukkan kesungguhan meraup simpati dari anak muda. Apa yang dilakukan Deni dan Darmadi tidak jauh dari hasil survei yang dilakukan Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).

Hasil survei yang dilakukan selama Mei-Juni 2023 menemukan adanya kecenderungan generasi Z dan generasi Y, atau pemilih pemula, yang condong ke PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Dari 16 partai politik, ARCI merekam, dua partai itu yang teratas memiliki tingkat popularitas di kalangan pemilih pemula.

Menurut Direktur ARCI, Baihaqi Siradj, kondisi itu menguntungkan dua partai karena pada Pemilu 2024 pemilih pemula atau Gen Z dan Gen Y menjadi primadona sasaran partai politik untuk meraup suara. Saat dilakukan survei pemilihan partai politik berdasarkan demografi, responden berumur 17-21 tahun atau generasi Z di Sidoarjo ada lima partai teratas yang mereka pilih, PDIP dan Golkar paling tinggi.

PDI Perjuangan dengan persentase 19,4 persen, kemudian di peringkat kedua ada Partai Golkar dengan 17,6 persen. Di peringkat tiga ada PKB dengan 13,2 persen, kemudian Partai



ANAK MUDA - Direktur ARCI Baihaqi Siradj memaparkan hasil survei tentang kemungkinan pilihan partai oleh anak muda di Sidoarjo.

Demokrat di posisi keempat dengan 9,6 persen, dan kelima Partai Gerindra dengan persentase 7,2 persen.

Responden Gen Y atau pemilih berumur 22-25 tahun, Baihaqi mengungkapkan, PDI Perjuangan dan Partai Golkar tetap menjadi dua partai teratas yang disukai responden. "Mereka memilih PDI Perjuangan dengan 15,1 persen, Partai Golkar 13,1 persen. Peringkat ketiga ada PKB dengan 12,1 persen kemudian yang menarik adalah perolehan sama persentase antara Partai Nasdem dan Demokrat yang sama-sama di angka 9,09 persen," ungkap Baihaqi.

Kondisi itu disebutnya karena pengenalan atau sosialisasi partai ke masyarakat dalam kontestasi Pemilu 2024 khususnya di Sidoarjo dilakukan baik oleh pengurus PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Dengan demikian, keduanya lebih banyak dikenal di kalangan Gen Z dan Y.

"Media Sosial dan pemberitaan di

media online menjadi rujukan Gen Z dan Y dalam mencari informasi. Itu termasuk tentang partai politik dan tokoh-tokoh politik," lanjutnya.

Survei ARCI ini dilakukan dengan populasi survei meliputi seluruh warga Sidoarjo di 18 kecamatan yang sudah memiliki hak pilih dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen sampel didatangi kembali atau spot check dalam quality control. Waktu wawancara lapangan dilakukan sejak 27 Mei hingga 4 Juni 2023.

Selain itu, Baihaqi juga menyebutkan, penarikan sampel menggunakan multistage random sampling terhadap 993 responden di 31 kelurahan dan 332 desa di 18 kecamatan se-Sidoarjo. Margin of error sebesar kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (ufi)

Tandatangan Rekomitmen, Gus Muhdlor Siap Selesaikan TLRHP

KOTA-Enam kepala daerah di Jawa Timur menandatangani rekomitmen penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Jawa Timur. Salah satunya Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor. Penandatanganan dilakukan di kantor Wali Kota Surabaya disaksikan Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur Karyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak serta Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, Jumat, (16/6).

Enam kepala daerah itu adalah Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo, Bupati Lamongan, Bupati Sumenep, Bupati Sampang, dan Plt Bupati Bangkalan.

● Ke Halaman 10



SIAP: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (kiri) usul menandatangani rekomitmen penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Jawa Timur.



Tandatangan Rekomitmen,...

Penandatanganan juga dihadiri ketua DPRD, Sekretaris Daerah serta inspektur masing-masing daerah.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengaku siap melakukan penyelesaian TLRHP seratus persen.

Ia akan meminta bimbingan dan arahan BPK Jatim. Dengan begitu diharapkan ada kemudahan dalam menindaklanjuti hasil temuan yang disampaikan BPK Jatim.

"Penandatanganan ini sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab kita bersama dalam memperbaiki pe-

ngelolaan keuangan daerah," ucapnya.

Gus Muhdlor sapaan bupati menegaskan, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD wajib ditindaklanjuti. Karena, Sidoarjo berkomitmen mempertahankan opini WTP. Kemarin sudah kesepuluh kalinya secara berturut-turut Kabupaten Sidoarjo meraih WTP.

Oleh karenanya komitmen itu akan terus dijaganya. Caranya dengan mewujudkan pengelolaan keuangan

daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. "Rekomitmen ini perlu untuk mengingatkan kita sebagai

pimpinan daerah akan pentingnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK," tegasnya. (nis/vga)





IST

PANDANGAN FRAKSI: Juru bicara Fraksi Gerindra Anang Siswandoko dalam rapat paripurna membahas LKPJ APBD 2022.

Pembangunan 2022 Sesuai Harapan, Ada Catatan dari Fraksi

KOTA-Dalam rapat paripurna yang membahas LKPJ APBD 2022, Jumat (16/6), fraksi-fraksi berkesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Juru Bicara Fraksi Gerindra Anang Siswandoko menyampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan pe-

merintah pada 2022 telah sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

Pemerintah daerah juga dinilai telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

● Ke Halaman 10



Pembangunan 2022...

Daerah (APBD) tahun 2022 dengan baik. Mengikuti prinsip tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel.

Dalam menutup buku tahun 2022, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2022 telah disusun. Namun, Anang mengkritisi ki-

nerja bagian perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah (Setda). Menurut dia, perlu dihitung ulang untuk rencana penganggaran gaji, tunjangan pegawai (TPP), dan tunjangan kinerja (TUKIN). Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tidak terlalu besar. "Pentingnya perencanaan kinerja yang memperhatikan hasil yang dihasilkan," ujarnya.

Anang juga mengungkapkan adanya keterbatasan dalam ketersediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Hal tersebut menjadi masalah dalam pelayanan administrasi kependudukan. Terutama terkait dengan penggabungan empat desa dan tiga kelurahan. Oleh karena itu, Fraksi Gerindra

menilai perlu dipertimbangkan untuk menghibahkan pengadaan blanko e-KTP dan sarana prasarana (sarpras) terkait ke pusat.

Dalam hal pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) melalui kegiatan pensertifikatan aset, Anang mengatakan bahwa prosesnya berjalan dengan baik. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo telah meningkat.

Namun, dia juga menekankan perlunya peningkatan dalam pensertifikatan tanah non-jalan, seperti sekolah, kantor puskesmas, dan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pensertifikatan aset tanah yang dimiliki oleh Pemkab agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Perlu Skala Prioritas dalam Membangun Sarpras Sekolah

KOTA-Komisi D DPRD Sidoarjo mendesak pemkab untuk menggunakan skala prioritas dalam membangun sarana prasarana (sarpras) sekolah di Kota Delta. Hal itu dilakukan agar dapat mencapai sasaran yang tepat.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso saat mengunjungi SDN Mergosari I di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Sabtu (17/6). Dari kunjungannya, terlihat bahwa sekolah mengalami kekurangan satu ruang kelas. Sehingga rumah dinas guru dimanfaatkan sebagai ruang belajar untuk siswa kelas IV.

Ruangan itu pun juga terlihat kurang memadai karena sempit. Plafon ruang kelas tersebut bahkan tampak berlubang di beberapa titik. "Kondisi ini tidak memenuhi standar," ujarnya.

Selain itu ruang guru SDN Mergosari I memiliki plafon yang melengkung dan rawan jebol. Ketika ada angin kencang, kemungkinan plafonnya bisa roboh.

Bangun menyebutkan bahwa temuan di SDN Mergosari I hanya merupakan contoh dari banyaknya kondisi sarpras SDN di Sidoarjo yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat.

Kondisi ini terjadi karena selama pandemi Covid-19, hampir tidak ada program perbaikan sarpras sekolah karena anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Padahal sebelumnya, mulai dari 2017 hingga 2019, DPRD Sidoarjo setiap tahun mengalokasikan dana sekitar Rp 60 miliar lebih untuk memperbaiki sarpras sekolah.

Oleh karena itu, DPRD Sidoarjo telah menyetujui anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) tahun ini guna melakukan kajian sarpras di sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, baik SDN maupun SMPN. "Tujuannya adalah agar ada skala prioritas

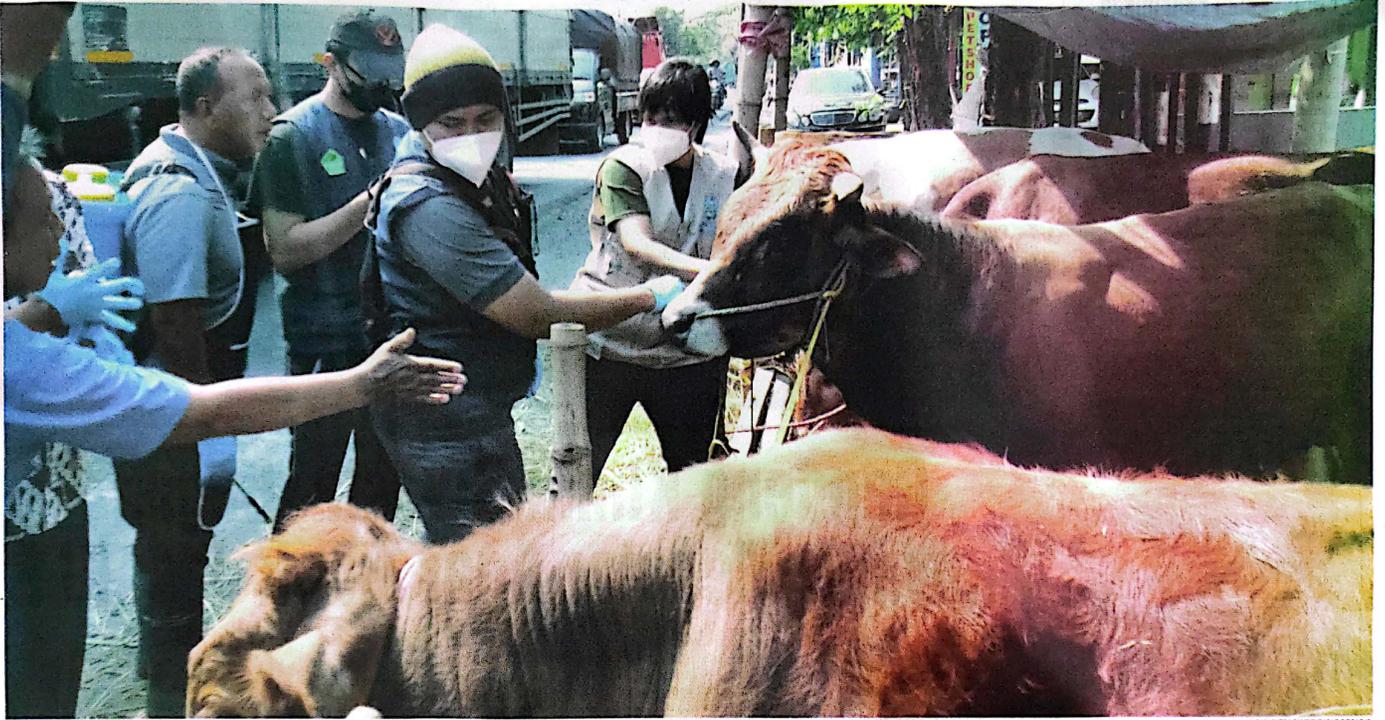
● Ke Halaman 10

Perlu Skala Prioritas...

sehingga pembangunan sarpras tepat sasaran," katanya. Dalam kajian sarpras ini, Bangun meminta agar Disdikbud menetapkan skala prioritas saat

melaksanakan pembangunan sarpras.

"Hanya yang benar-benar menjadi prioritas yang harus didahulukan. Jangan sampai yang sudah lengkap malah ditambah lagi," ucap politikus PAN tersebut. (nis/vga)



ANTISIPASI: Petugas Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo mengecek sejumlah sapi yang dijual untuk kurban di Jalan Lingkar Timur.

Cegah Penyebaran Penyakit, Cek Hewan Kurban

KOTA-Jelang perayaan Idul Adha, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo terjun ke lapangan. Mereka mengecek kesehatan puluhan ekor hewan kurban di Lingkar Timur, Jumat (16/6).

Kepala Bidang Produksi Peternakan dan Kesmavet drh Tony Hartono mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa ternak yang dijual di sejumlah tempat di Sidoarjo aman

bagi masyarakat.

"Jadi ini kita pemeriksaan antemortem sapi sebelum dipotong diperiksa kesehatannya. Apabila nanti ada yang sakit, kita sarankan ke pemilik kandang untuk dipisahkan," kata Tony.

Menurutnya, semisal ada penyakit seperti Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan kurban maka akan jadi perhatian. Untuk LSD kategori ringan,

masih sah untuk dipotong. Tetapi untuk kategori sedang dan berat dinyatakan tidak sah untuk dipotong dan disarankan untuk tidak dijual oleh pedagang.

LSD merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari keluarga poxviridae. Penyakit ini ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit sapi, terutama pada bagian leher,

punggung, dan perut.

"Saat ini hewan kurban di Lingkar Timur kondisinya masih sehat, hanya nanti kita akan mengecek ke daerah lain. Jika nanti kita menemukan sapi yang tidak sehat dan tidak layak, kita sarankan untuk tidak dijual," ujarnya.

Dia menambahkan, sapi dari Jawa Timur banyak berasal dari Madura. Seperti dari Bangkalan, Sumenep, dan

Pamekasan. Selain itu ada yang berasal dari daerah Lumajang, Probolinggo, Malang, Lamongan, dan Tuban.

Menurutnya, kebutuhan hewan kurban tahun lalu di Sidoarjo mencapai 7 ribu ekor sapi. Sedangkan yang masuk sekitar 5 ribu ekor sapi. Terkait dengan perizinan, dari daerah asal hewan kurban sudah harus

● Ke Halaman 10



Cegah Penyebaran...

dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan. "Itu merupakan salah satu upaya untuk pengendalian penyakit, tentunya dalam surat rekomendasi masuk, selain surat keterangan kese-

hatan hewan, nanti juga dicantumkan bukti sudah divaksin," jelasnya.

Di Sidoarjo terkait kasus LSD sudah 250 ekor sapi yang terinfeksi. Kondisinya masih bisa disembuhkan dengan perawatan intensif, namun masih butuh waktu. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hari Ini Berangkatkan Dua Kloter Haji Terakhir dari Sidoarjo

KOTA-Hari ini, pemberangkatan jamaah haji dari Sidoarjo akan dilaksanakan di Pendopo Delta Wibawa. Yakni dari kloter 75 dan 76. Masing-masing kloter terdiri dari 445 jamaah. Sehingga totalnya ada 890 jamaah haji yang akan diberangkatkan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo Arwani mengatakan, dalam pemberangkatan kali ini, jamaah haji masuk dalam gelombang 2. Artinya langsung turun di Jeddah. "Sedangkan

yang gelombang 1 turun di Madinah," ujarnya.

Dia juga memastikan bahwa tidak ada visa yang belum selesai hingga saat ini. Meskipun pada awalnya terdapat beberapa kendala terkait visa, namun semua masalah tersebut telah berhasil diatasi. Sehingga tidak ada jamaah yang menghadapi hambatan untuk berangkat.

Arwani mengaku sangat bersyukur bahwa pemberangkatan jamaah haji dari Sidoarjo dapat dilaksanakan dengan lancar. "Meski sempat

mengalami kendala terkait visa, tetapi semua jamaah telah berhasil menyelesaikan persyaratan tersebut dan siap untuk berangkat ke Tanah Suci," imbuhnya.

Menurut dia, pemberangkatan jamaah haji merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh jamaah. Mereka telah menjalani persiapan dan pelatihan selama beberapa waktu untuk menjalankan ibadah haji dengan baik. Selain itu, pemerintah daerah Sidoarjo juga



BERANGKAT: Jamaah haji yang diberangkatkan dari Pendopo Delta Wibawa beberapa waktu lalu.

● Ke Halaman 10



Hari Ini Berangkatkan...

memberikan dukungan penuh dalam hal persiapan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh jamaah.

Arwani juga bahwa akan ada kuota tambahan pemberangkatan pada

tanggal 23 Juni mendatang. Namun, jumlah pastinya masih menunggu hingga batas akhir pelunasan hari ini. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 33 orang telah melunasi biaya dan memastikan keikutsertaannya dalam kuota tambahan tersebut. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Gus Muhdlor menyalurkan secara simbolis bantuan beras di Tanggulangin.

Keluarga Prasejahtera Dipastikan Terima Bantuan Perlindungan Sosial

Sidoarjo, Memorandum

Bupati Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor mengungkapkan keprihatinannya saat menerima laporan ada keluarga prasejahtera yang tiba-tiba tidak mendapatkan kembali bantuan perlindungan sosial.

Padahal biasanya bersangkutan rutin menerima bantuan dari pemerintah. Menyikap hal itu bupati menegaskan jangan sampai ada keluarga prasejahtera yang tidak tersentuh mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Gus Muhdlor meminta kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk melaporkan ke Dinas Sosial Pemkab Sidoarjo apabila mendapati ada keluarga yang membutuhkan bantuan.

Rasa prihatin itu disampaikan Gus Muhdlor di sela-sela menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) tahun 2023 tahap 3 di lima desa Kecamatan Tanggulangin, Kamis (15/6).

Kelima desa itu yakni Desa Ngaban, Desa Kalitengah, Desa Kalisampurno, Desa Kedensari, dan Desa Kludan. Menurut Gus Muhdlor bantuan dari pemerintah sangat diharapkan keluarga prasejahtera.

Seperti bantuan program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan nontunai (BPNT).

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Total jumlah penerima bantuan sosial beras se-Tanggulangi sebanyak 3.832 PKH.

Dalam kegiatannya ke Tanggulangi, bupati muda itu mengecek masyarakat penerima bantuan. Ia menanyakan langsung warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Apakah bantuan yang diterimanya selama ini lancar apa tersendat atau ada kendala.

"Yang antara keduanya (PKH maupun BPNT) *mboten mudun blas jenengan* (tidak turun sama sekali nama anda) angkat tangan, itu kadang nama di KTP-nya invalid, mungkin ejaan namanya tidak sesuai dengan penulisannya," tanya bupati kepada warga Desa Ngaban yang menerima bantuan pangan di balai desa setempat.

Gus Muhdlor mengatakan ada berbagai faktor penerima manfaat bantuan perlindungan sosial tidak lagi memperolehnya. Salah satunya mereka memperoleh dua program bantuan sekaligus dari pemerintah.

Oleh karenanya masyarakat tidak perlu khawatir. Ia pastikan masyarakat dapat menerima bantuan kembali meski hanya dari satu program bantuan.

"Sekarang ada kebijakan bila tahun lalu masyarakat dapat menerima dua bantuan sekaligus, namun tahun ini dijadikan satu, entah itu dapat bantuan dari PKH atau BPNT," ucap Gus Muhdlor.

Namun ada juga masyarakat penerima manfaat yang belum menerima kembali bantuan tersebut. Untuk itu ia meminta kaur kesra dapat melakukan pendataan kembali. Siapa saja yang tidak lagi menerima bantuan tersebut. Dari data itu Pemkab Sidoarjo akan mengajukan kembali bantuan tersebut.

Gus Muhdlor juga mewanti-wanti warga penerima bantuan agar menjaga undangan penerima bantuan pangan tersebut. Pasalnya terdapat *barcode* konfirmasi penerima pada undangan penerima bantuan yang dapat disalahgunakan orang lain.

Oleh karenanya ia meminta warga penerima bantuan untuk tidak menyerahkan undangan ke orang lain. Serahkan kepada petugas penyaluran bantuan. Seperti ke tenaga SLRT yang tersebar di setiap desa.

"Alhamdulillah di Sidoarjo tidak ada kasus seperti ini (penyalagunaan undangan penerima bantuan), jadi bapak ibu penting undangan ini disimpan yang benar, berikan kepada petugas penyalur bantuan," pesan bupati kepada penerima bantuan.

Gus Muhdlor juga meminta kepedulian masyarakat kepada sesamanya. Segera lapor bila mengetahui warga tidak mampu yang membutuhkan uluran tangan. Pemerintah desa akan turun langsung. Gus Muhdlor ingin pemerintah hadir bagi seluruh warga Sidoarjo. Terutama terhadap warga kurang mampu.

"Kalau ada warga Ngaban lebih susah dari pada *jenengan* tidak mendapat bantuan apapun segera lapor ke desa, nanti Baznas Sidoarjo yang akan memberi," ucap Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor juga meminta masyarakat juga melapor bila menjumpai masyarakat yang benar-benar kesulitan dalam hidupnya. Masyarakat yang sudah tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Hidupnya sendiri tanpa sanak saudara. Pemkab Sidoarjo akan hadir bagi warga Sidoarjo yang seperti ini.

Program permakanaan gratis akan disalurkan. Makan pagi dan malam akan dijamin Pemkab Sidoarjo. "Kalau ada warga Ngaban, diberi beras tidak mampu memasak, diberi uang tidak mampu membelanjakan, istri tidak ada, anak tidak ada, saudara juga tidak ada, hidupnya sendirian, *jenengan* laporkan kaur kesra, pagi akan diantarkan nasi, sore juga akan diantarkan nasi," sebutnya.

Gus Muhdlor juga menyampaikan kepada masyarakat tidak mampu untuk tidak takut berobat hanya karena masalah biaya. Pemkab Sidoarjo akan menjamin kesehatan bagi masyarakat miskin. Cukup berbekal SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari desa, masyarakat dapat berobat ke RSUD Sidoarjo maupun RSUD Sidoarjo Barat.

"Sekarang jangan takut lagi pergi ke rumah sakit karena alasan tidak punya biaya, pergi ke Pak RT, bilang ke Pak Kades minta surat keterangan tidak mampu, langsung bisa masuk ke RSUD Sidoarjo, atau RSUD Krian," ujar bupati.

Penyerahan bantuan pangan tersebut, selain di Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangi juga dilakukan di Desa Kallitengah, Desa Kalisampurno, Desa Kedensari, dan Desa



Proyek JUT desa Sidomulyo yang terindikasi korupsi tanpa papan nama.

DIDUGA TERINDIKASI KORUPSI KADES DAN TPK DESA SIDOMULYO SALING LEMPAR TANGGUNGJAWAB, TERKAIT PAVINGISASI JUT

Sidoarjo, Pojok Kiri

Proyek pembangunan pavingisasi Jalan Usaha Tani (JUT) RW/02. Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, diduga proyek, "Siluman" yang diduga terindikasi korupsi. Pasalnya, di lokasi proyek pavingisasi tidak terpasang papan nama informasi kegiatan maupun prasasti, hal ini ditandaskan Solik ketua LSM AMPK Aliansi Masyarakat Perangi Korupsi saat dikonfirmasi wartawan, Minggu 8/6/23. "Diketahui bahwa pemasangan papan nama proyek adalah implementasi azas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses penga-

wasan," tandas Solik.

Sedangkan menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor:14 tahun 2008, dimana mengatur setiap pekerjaan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek memuat jenis kegiatan, lokasi proyek anggaran serta jangka waktu pekerjaan, namun ada apa dengan proyek JUT desa Sidomulyo kok tidak dipasang papan nama, Urainya. Solok katakan pada wartawan, dia akan Puldata dan Pulbaket dan jika nanti terbukti ada dua alat bukti yang mendukung tindak pidana korupsi, ia akan laporkan

secara resmi ke Kejaksaan maupun ke Polresta Sidoarjo, Cetus Solik.

Sementara beberapa bulan yang lalu, Kepala Kejari Sidoarjo, mengundang dan menggelar penyuluhan hukum dengan Kades-Kades di Sidoarjo dikarenakan banyak Kades yang tersandung perkara pidana, ada juga yang dilaporkan ke Kejaksaan karena pengelolaan anggaran desa. Para Kades diwanti-wanti agar jangan sampai terjadi pengurangan dan permainan dalam pelaksanaannya.

"Pengelolaan anggaran desa dan manajemen keuangan harus benar-benar diper-

hatikan, monitoring harus terbuka. Masyarakat harus bisa mengawasi program-program yang ada di desa," imbuhnya.

Sementara itu, Anwar Kasie Kesra juga sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sidomulyo saat dikonfirmasi Pojok Kiri mengenai papan nama maupun prasasti yang tak dipasang, Anwar menyampaikan papan nama proyek itu, kelalaian pihak desa dan mohon maaf saya akan memasang papan nama kegiatan, ungkapnya saat ditanya berapa anggaran yang digunakan untuk pavingisasi jalan usaha tani di RW/02,

Anwar mengatakan lupa. Anwar menyampaikan lebih jelasnya konfirmasi aja sama pak Kades.

Saat Tim Pojok Kiri menanyakan ke kepala desa Kades, P.J. Muchamad Jainul, ia menyarankan ke TPK saja. Ini aneh (TPK) sarankan ke Kades Sementara Kades sarahkan ke Anwar TPK. Pojok Kiri mengambil kesimpulan bahwa antara kades dengan TPK tidak sinkron. Alias saling lempar tanggungjawab mengenai anggaran yang masuk di desa dari bantuan keuangan BK anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. (Tim/bersambung)

POJOK KIRI

Tolak Wisuda PG - SMA Buang Duit!

Pengacara Cak Sholeh dan Wali Murid Angkat Bicara

SIDOARJO - Ramai pro dan kontra penolakan wisuda playgroup, TK, SD, SMP dan SMA, bermunculan. Banyak tanggapan penolakan, khususnya dari wali murid di Sidoarjo.

Di Instagram Mendikbud Nadiem Makarim, viral sebuah video menyuarakan untuk menghilangkan wisuda TK hingga SMA. Tak terkecuali Cak Sholeh, Lawyer asal Sidoarjo ini mengunggah di akun TikTok pribadinya dengan tegas menolak wisuda, karena dianggap membuang waktu dan uang.

"Lagi rame-rame penolakan wisuda anak Playgroup, TK, SD, SMP dan SMA. Ini contohnya anak saya ini besok akan wisuda Playgroup. Semuanya dianggap tidak perlu, buang-buang waktu dan duit," ucap Cak Sholeh dalam unggahannya di akun TikTok yang dikirimi ke duta.co, Minggu (18/6/23) pagi.

Cak Sholeh melanjutkan, bagi mereka yang mampu membayar wisuda bukan jadi masalah, namun, bagi mereka yang kurang

mampu, ditambah lagi wisuda yang bersifat seremonial, akan jadi persoalan.

"Saya setuju wisuda untuk anak-anak kecil Playgroup, TK, SD, SMP dan SMA ditiadakan. Lebih baik mereka serius beli buku dibanding acara seremonial wisuda," pungkasnya.

Di tempat terpisah, M. Lazim, salah satu dari sekian banyak orang tua murid yang tidak setuju adanya Wisuda tingkat SMA kebawah, mengatakan, wisuda tidak perlu dilakukan karena tidak memberi manfaat. "Karena dari sisi manfaatnya tidak ada, apalagi saat ini situasi perekonomian masih terpuruk gak stabil sejak bahan pokok naik, terlebih BBM dan lainnya," ungkap warga Tanggulangin ini.

M. Lazim juga menjelaskan, terkait wisuda untuk pelajar SMA, masih bisa ditoleransi, karena ijazah lulus SMA bisa dipakai untuk melamar pekerjaan. Hal itu mungkin bisa juga jadi kenangan terakhir bersama teman-teman sekolah.

"Sangat tidak setuju, karena terkadang

mereka orang tua murid terpaksa, karena untuk busana wisuda satu paket dengan dengan makeup di salon terlebih akan menambah biaya lagi," pungkas M. Lazim.

Sementara, salah satu wali murid lainnya, Arief (54), menyikapi terkait berbagai polemik wisuda dengan gelaran menggunakan atribut wisuda seperti layaknya mahasiswa.

Kepada duta.co, ia menegaskan sangat tidak setuju adanya wisuda kelulusan tingkat SMA kebawah, karena memberatkan.

"Belum lagi sewaktu kenaikan kelas uang daftar ulang, uang buku, uang LKS dan lainnya. Lah ini lulus saja juga bayar uang wisuda, khususnya baik Playgroup, TK, SD, SMP dan SMA sangat tidak setuju. Kebutuhan tidak hanya itu dijenjang sekolah, apalagi belum sewa baju wisuda dan lainnya," pungkas Arief. • Loe

Screenshot unggahan akun Tik Tok cak Sholeh tolak wisuda Playgroup, TK, SD, SMP dan SMA.



Gandeng Klinik Swasta, Cegah Penyakit Menular Agar Tidak Jadi KLB

KOTA-Dinas Kesehatan Sidoarjo dan Dinas Kesehatan Jawa Timur mengadakan pertemuan koordinasi penyakit potensial wabah. Kegiatan itu diikuti oleh beberapa klinik swasta di Sidoarjo.

Fungsional Epidimolog Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Hugeng Susanto menyebutkan, Leptospirosis merupakan penyakit menular yang dapat ditularkan melalui air kencing tikus. Risiko penularan penyakit tersebut meningkat saat terjadi banjir. Yakni ketika air yang tercemar oleh tikus mengenai manusia.

Dia menjelaskan, penyakit tersebut dikategorikan

sebagai penyakit yang berbahaya. "Jika tidak ada penanganan serius dalam waktu 9 hari, penderita bisa meninggal dunia," katanya.

Lebih lanjut, Hugeng menjelaskan bahwa penyakit itu menyerang ginjal. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan guna mencegah penularan penyakit tersebut.

Selain Leptospirosis, Hugeng juga mengingatkan bahwa masih ada beberapa penyakit menular lainnya yang perlu diwaspadai. Seperti anthrax, avian influenza, hepatitis, influenza, TBC, dan SARS. Jika terjadi Keja-

dian Luar Biasa (KLB), semua pihak diharapkan merespon dan berkoordinasi dengan cepat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo Fenny Apriawati menyampaikan bahwa Sidoarjo telah mengalami situasi KLB penyakit campak di sekitarnya. Seperti di Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Gresik. "Beruntungnya Kabupaten Sidoarjo tidak terdampak oleh KLB tersebut," ujarnya.

Dalam konteks lain, Kasi Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Qudrotin menginformasikan bahwa pihaknya sedang melakukan pengambilan sampel pada tujuh



PENGETAHUAN: Fungsional Epidimolog Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Hugeng Susanto memberikan materi tentang pencegahan penyakit menular kepada petugas klinik swasta di Kabupaten Sidoarjo.

kasus yang diduga terinfeksi ada kepastian mengenai penyakit polio. Namun, belum hasilnya. (nisi/vga)



Genap Setahun Layanan Parkir Dikelola Pihak Ketiga

Dishub Sidoarjo Masih Enggan Adendum

SIDOARJO - Genap setahun layanan parkir di Kota Delta dikelola pihak ketiga, yakni PT Indonesia Sarana Servis (ISS)-Kerja Sama Operasi (KSO). Meski konflik soal pengelolaan parkir belum menemukan titik temu, sejumlah inovasi dimunculkan PT ISS-KSO.

Direktur Operasional PT ISS Dian Sutjipto mengatakan, pada 17 Juni 2022 pihaknya mulai mengelola parkir. "Perjanjian berjalan sejak 17 Juni 2022," katanya.

Setahun berjalan, lanjut dia, sudah ada sejumlah perubahan. Parkir di GOR Gelora Delta kini sudah satu pintu. "Kami terapkan manajemen

modern *barrier gate system*," ujarnya.

Dengan sistem tersebut, pengunjung GOR mendapatkan tiket lewat mesin saat masuk GOR. Mereka membayar parkir saat keluar. "Sekarang juga sudah menerapkan pembayaran lewat QRIS," katanya. Dulu, penarikan parkir di GOR ada di tiap titik. Artinya, pengunjung membayar parkir berkali-kali saat mereka pindah titik. Misalnya, saat ke lapangan voli, saat ke kolam renang, dan lainnya. "Geliat *event* skala lokal ataupun nasional pun sekarang sering terlihat dan dilirik para EO untuk digelar di GOR," tuturnya.

Menurut Dian, itu membuktikan pengelolaan parkir di sana kondusif dan menjadi daya tarik penyelenggara *event*.

Dian mengaku tetap berinovasi

meski sampai saat ini masih sekitar 30 titik yang mereka kelola dari total 359 titik yang dijanjikan Pemkab Sidoarjo. "Saat ini tidak lebih dari 30 lokasi efektif yang kami kelola layanan parkirnya," tuturnya.

Karena itu, kendati sudah mengelola selama setahun, pihaknya belum bisa memberikan setoran ke Pemkab Sidoarjo. Sebab, Pemkab Sidoarjo meminta setoran sebesar Rp 32,09 miliar. Padahal, yang dikelola tidak sampai 359 titik sesuai yang dikerjasamakan. "Kami siap setor, tapi belum ada dasarnya," katanya.

Menurut dia, nilai yang disetor harus sesuai dengan titik yang dikelola. Karena itu, pihaknya berharap ada adendum kerja sama dan kesepakatan nilai yang disetorkan sesuai dengan

titik parkir riil di Sidoarjo.

Kepala Dishub Sidoarjo Benny Airlangga mengatakan, pihaknya menunggu keputusan pengadilan terkait pengelolaan parkir di Sidoarjo. Pihaknya tidak ingin ada adendum perjanjian kerja sama parkir. Pihaknya tetap ingin putus kontrak dan pihak ketiga tetap menyeter Rp 32,09 miliar. Meski, yang dikelola tidak sampai 359 titik seperti yang tertuang dalam perjanjian kerja sama.

Karena itu, pihaknya menunggu keputusan pengadilan. Baik terkait jumlah setorannya maupun keputusan putus kontrak atau tidak. "Kami sudah melayangkan gugatan. Ini menunggu jadwal sidanganya keluar," katanya. (uzi/c7/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

MITRA

Kuota 'Kurma' Terpenuhi



M Edi Kurniadi

PENDAFTARAN program 'Kurma' atau Kredit Usaha Perempuan Mandiri di Kabupaten Sidoarjo, sudah ditutup pada Jumat, 9 Juni 2023 lalu. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, M. Edi Kurniadi ST MM, mengaku sempat deg-degan menjelang hari-hari terakhir batas akhir pendaftaran tersebut.

"Alhamdulillah pendaftar 'Kurma' malah melebihi kuota," kata Edi, belum lama ini. Dari 2.400 kuota, saat akhir penutupan pendaftaran, malah ada sebanyak 5.543 kelompok pendaftar. Tetapi jumlah itu nanti bisa akan

▶▶ ke halaman 11

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jatim

Kuota 'Kurma' Terpenuhi

● Sambungan hal 1

berkurang, karena akan ada proses seleksi.

Edi yang pertengahan Juni 2023 ini akan menunaikan ibadah haji bersama istri, mengaku merasa hatinya menjadi lebih tenang. "Semoga bermanfaat bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo, agar usahanya semakin maju berkembang," katanya.

Dari semua pendaftar, menurut catatannya paling banyak adalah dari kelompok usaha makanan dan minuman. Kecamatan yang banyak mendaftarkan usaha mamin tersebut adalah dari Kecamatan Sidoarjo. Meski demikian, diakui juga ada wilayah kecamatan yang kelompok usaha perempuannya sedikit untuk ikut mendaftarkan dalam program 'Kurma' itu.

'Kurma' di Kabupaten Sidoarjo mulai dijalankan sejak 2022 lalu. Ada sebanyak 1.891 kelompok usaha perempuan yang ikut. Pada tahun itu, sudah mampu melahirkan sekitar 300-an UMKM yang Go Ekspor.

Karena dinilai bermanfaat untuk menumbuhkan ekonomi di lapisan bawah, maka program 'Kurma' tahun 2023 juga dilanjutkan dengan dibackup anggaran sebesar Rp23 miliar. Dengan rincian Rp20 miliar untuk bantuan dan Rp3 miliar dipakai untuk kegiatan pelatihan pendukung usaha dan pelatihan pemasaran. [kus.iib]

Musim Kemarau, Waspada Debit Air Turun



SUPLAI: Truk tangki Perumda Delta Tirta yang mendistribusikan air ke warga.

KOTA-Memasuki musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan bahwa suhu udara akan meningkat. Mencapai kisaran 25 hingga 34 derajat celsius. Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan masalah serius bagi pasokan air di Perumda Delta Tirta.

Direktur Utama Perumda Delta Tirta Dwi Hary Soeryadi memperkirakan bahwa debit air sungai kemungkinan akan turun signifikan akibat musim kemarau. Apalagi jika ada ancaman kemarau panjang. Situasi ini dapat menyebabkan kekeringan di beberapa sumber air. "Bisa mengancam pasokan air bersih bagi pelanggan," katanya.

Dwi menjelaskan, memang tidak semua wilayah berpotensi terjadi kekeringan dari bahan baku air. Salah satu wilayah yang kerap terjadi kekeringan adalah di IPA Tawangsari, Kecamatan Taman. Debit air bisa mengecil bahkan sampai tidak keluar sama sekali.

Menyikapi ancaman ini, Dwi mengaku pihaknya telah menyiapkan layanan truk tangki

air sebagai upaya menghadapi kemungkinan kekurangan pasokan air. Mekanismenya pun dirancang dengan mudah agar warga yang mengalami kesulitan mengakses air bersih dapat berkoordinasi dengan desa masing-masing untuk mengajukan permohonan bantuan air bersih.

Dwi menyadari betapa pentingnya pasokan air bersih bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Terutama dalam situasi kemarau. "Oleh karena itu, kami siap memberikan bantuan seoptimal mungkin dengan menggunakan truk tangki air," ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara efisien dan menghindari pemborosan. Serta menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi risiko terjadinya kekeringan yang lebih parah.

Menurut dia, kondisi cuaca panas yang diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan memerlukan kerjasama dan kesadaran dari seluruh warga setempat untuk menjaga pasokan air bersih. (nis/vga)

RADAR
SIDOARJO.ID

Bentuk Relawan Pemadam Kebakaran Tingkat Desa

KOTA-Relawan Pemadam Kebakaran (redkar) dibentuk. Tujuannya untuk mempercepat waktu tanggap dengan cara memberdayakan masyarakat. Redkar dibentuk oleh Bidang Pemadam dan Penyelamatan Sidoarjo bekerja sama dengan

pemerintah desa.

Udik Arif Muzaiyyin, Bidang Sarana dan Prasarana mengatakan, jika terjadi kebakaran waktu tanggap sangat penting. Ideal waktu yang diberikan di bawah 15 menit sejak pertama kali terima telepon

sampai melakukan penyemprotan di lokasi kejadian.

"Pada bulan ini kita ada kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan edukasi. Kita adakan edukasi di Desa Gilang, Kecamatan Taman.

Ada sekitar 40 orang yang kita edukasi, sosialisasi dan kita motivasi untuk membentuk redkar tingkat desa," ujarnya.

Dia menyebutkan, sosialisasi juga dilakukan di Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin dengan model dan tujuan yang sama.

Pesertanya 40 orang. Terdiri dari perangkat desa, RT, RW, linmas dan juga penggiat sosial. Dengan adanya relawan harapannya ketika ada kebakaran masyarakat bisa melakukan tindakan awal.

"Kita mengharapkan pemerintah desa membentuk redkar tingkat desa karena mempercepat perolehan response time," jelasnya.

Di triwulan pertama sudah ada 27 kejadian kebakaran. 15 di antaranya sudah masuk response time. (dik/vga)



WASPADA: Lahan kering berpotensi terjadi kebakaran jika tidak diantisipasi sejak dini.

DIKY PUTRA SANSIR/RADAR SIDOARJO

RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Finalis Duta Antinarkoba Sidoarjo 2023 berlatih di Pendapa Disporapar.

Jalani Karantina, Dibekali Ragam Ketrampilan

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Sebanyak sepuluh pasangan finalis atau dua puluh orang Duta Antinarkoba Sidoarjo 2023 bakal menjalani masa karantina pada 21-22 Juni 2023 di Kantor Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo.

Para finalis ini nantinya akan dikukuhkan secara resmi pada Grand Final Pemilihan Duta Antinarkoba Sidoarjo 2023 di Graha KBM, Balongbendo, pada 26 Juni 2023. Acara ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti-Narkotika Internasional (HAND).

Panitia Pemilihan Duta Antinarkoba Sidoarjo 2023 Yuga Dhany Seiswantara menjelaskan, selama masa karantina, para finalis mendapatkan sejumlah pelatihan. "Yakni personal branding, public speaking, beauty class, dan materi pokok yaitu tentang pencegahan narkoba," jelas Yuga, Minggu (18/6).

Ia menyebut, 20 finalis tersebut merupakan hasil seleksi yang digelar dalam beberapa tahap sejak 20 Mei 2023 lalu. Tahap awal, seleksi diikuti 110 peserta hingga mengerucut menjadi 20 orang finalis.

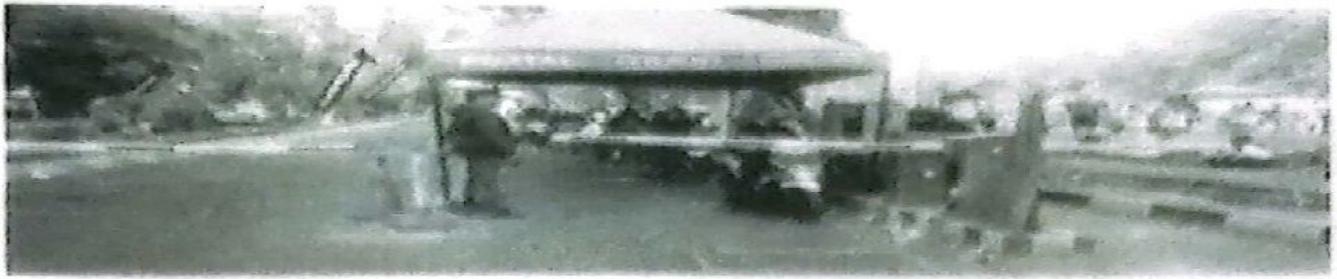
"Kegiatan ini untuk mencari pemuda pemudi Kabupaten Sidoarjo yang sadar akan bahaya narkoba dan dapat melakukan aksi sebagai upaya mengurangi terjadinya penyalahgunaan narkoba di Sidoarjo," tandas Duta Antinarkoba Sidoarjo 2022 ini.

Yuga menambahkan, pemilihan Duta Antinarkoba Sidoarjo digelar oleh Ikatan Duta Antinarkoba Sidoarjo, Badan Narkotika Nasional (BNNK) Sidoarjo dan Disporapar Sidoarjo. Selain itu, juga didukung sejumlah pihak. Kegiatan ini digelar rutin setiap tahun. (sta/rd)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Keluar masuk Areal Gor Sidoarjo kendaraan dengan one gate system dan pembayaran GRIS Mandiri.

Pengelolaan Parkir Dalam Setahun ISS-KSO di Gor Sidoarjo Elegan

Sidoarjo, Pojok Kiri

Setahun sudah pengelolaan parkir di Sidoarjo dilakukan oleh pihak ketiga PT ISS. Menilik perubahan apa yang bisa diterima masyarakat dengan hadirnya ISS-KSO sebagai mitra Pemkab dalam mengelola parkir sangat menarik untuk dibahas.

Perubahan yang paling kentara dan sangat bisa dijadikan tolak ukur adalah pengelolaan parkir di area GOR Delta Sidoarjo, yang mana sebelumnya ikon kota Sidoarjo ini terkesan kumuh amburadul dan semrawut ditambah ketika malam terkesan sangat rawan keamanan, namun saat ini menjadi mampu bersolek lebih baik dengan hadirnya pengelola parkir ala ISS-KSO.

“Dengan mengusung tema manajemen modern barrier gate system layaknya pengelolaan parkir mall menjadikan wajah salah satu ikon kota Sidoarjo tersebut berubah jauh lebih baik,” ucap Fauji tokoh masyarakat desa Sumpat saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (18/6/23) terkait pengelolaan parkir Gor Sidoarjo.

Sedangkan sisi lain teramati hal tersebut juga menjadikan semangat Dispora sebagai pengelola aset GOR juga terlihat bersolek seirama. Geliat even skala lokal ataupun nasional pun sekarang sering terlihat dilirik oleh para EO untuk digelar di GOR Delta.

“Faktor faktor diatas adalah pembuktian bagi ISS-KSO bahwa mereka mampu menyajikan konsep pengelolaan parkir modern yang baik di area publik milik pemerintah daerah yang selama ini dipungkiri ataupun tidak, tidak mampu dikelola dengan baik dan terkesan pembiaran oleh Dinas Perhubungan sebagai pelaksana teknis layanan parkir di Sidoarjo,” cetus tokoh masyarakat Banjarnendo, M Ridwan pada wartawan.

Sedangkan masyarakat Sidoarjo dengan one gate system parkir mereka diuntungkan dengan hanya membayar Rp 3.000 untuk sepeda motor dan mobil Rp 5.000 selama parkir didalam Gor sehari, namun sebelumnya parkir manual bisa membengkak berkali-kali saat parkir di Gor, sekali parkir di satu sisi ditarik pindah sisi lain ditarik lagi oleh Jukir bisa bisa kalau parkir 5 kali pindah sudah Rp 25.000, Tuter pembeli kuliner Slamet pada wartawan.

Sedangkan masyarakat Sidoarjo juga merasa enjoying dengan sistem GRIS Mandiri pembayaran parkir oleh PT ISS, Ucap Ainur. (Khol/Es)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Jadi Daya Tarik Pengunjung Masjid

Warga yang datang untuk beribadah di Masjid Desa Wadungasri disuguhkan dengan pemandangan akuarium berisi ikan hias. Selain itu juga ada kolam berisi ikan predator. Keunikan tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Jika biasanya jarang ada masjid yang memelihara ikan, justru di Masjid Al Huda mempunyai kolam, juga akuarium untuk memelihara ikan.

DIKY PUTRA SANSIRI, Wartawan Radar Sidoarjo

SAMBIL beristirahat setelah beribadah, pengunjung masjid dapat memanjakan matanya dengan melihat ikan-ikan unik yang ada di halaman Masjid Al Huda.

Di halaman masjid terdapat satu akuarium berisi ikan hias dan kura-kura. Setelah memasuki latar masjid, tepat di bawah tangga dekat tempat beristirahat, ada sebuah kolam dengan berisikan empat ekor

ikan besar. Masuk sedikit ke dalam lagi dekat dengan tempat wudhu ada satu akuarium lagi berisi ikan hias dan kura-kura.

Takmir Masjid Al Huda Rofik mengatakan bahwa yang terdapat di kolam, orang setempat menyebutnya ikan buaya atau lebih dikenal dengan ikan aligator. Ikan tersebut termasuk dalam

● Ke Halaman 10



JADI TONTONAN: Koleksi ikan di Masjid Desa Wadungasri.



Jadi Daya Tarik...

jenis ikan predator. Jika di akuarium yang depan terdapat jenis ikan sapu-sapu, pacu, patin, lele, juga ada kura-kura dari Brazil. Sedangkan akuarium yang ada di dalam terdapat jenis ikan koi dan koki.

Rofik menjelaskan, ikan yang ada di masjid itu merupakan hibah dari pengunjung masjid. Ada juga dari Takmir Masjid Al Huda yang beli sendiri. "Beberapa waktu lalu baru diberi akuarium dari teman-teman, kalau ikan predator dari teman-teman pengurus memakai uang pribadi," ujar Rofik.

Menurut pria 39 tahun itu, ikan-ikan yang ada di Masjid Al Huda sudah ada semenjak 4 tahun yang lalu. Tetapi masih belum banyak masyarakat yang tahu. Sebenarnya ada 1 ikan aligator besar yang didapatkan dari pengunjung masjid. Kemudian pengurus masjid membeli sendiri sebanyak 3 ekor agar ikan yang pertama mempunyai teman. "Teman-teman pengurus masjid kebetulan semua suka ikan, biar tidak jenuh, tidak kosong kolamnya, akhirnya di sini dipelihara ikan," imbuhnya.

Dia menyampaikan bahwa ikan aligator tersendiri memakan ikan-ikan kecil hidup, ikan mati, ikan

mujair mati. Sehari bisa menghabiskan 2 kilogram ikan untuk makanan ikan aligator. Sedangkan ikan hias yang lain makanan yang dibutuhkan seperti makanan ikan pada umumnya, yakni pur ikan.

Rofil menyebutkan, pakan ikan biasanya disuplai dari pemilik tambak di sekitar. Terkadang pengurus masjid juga beli sendiri ikan kecil-kecil. Bahkan jika ada yang mau memberikan makan ikan juga diperbolehkan.

Diakuinya, dalam mengurus ikan aligator tidak ada kesulitan. Sebab ikan tersebut termasuk jenis ikan yang kuat. Walaupun airnya kotor tapi masih tetap bisa bertahan. Berbeda dengan ikan hias yang lainnya, jika kotor sedikit sudah pasti ada yang mati. Untuk ikan hias, airnya harus diganti 2 minggu sekali.

"Ikan aligator ini jika telat makan mudah emosi, jadi kita harus tiap hari memberikan makan, tapi kalau gigit tidak pernah," sebutnya.

Dia menambahkan bahwa, di masjid ini ada tempat untuk istirahat, jika pengunjung masjid ingin beristirahat ada tempat tersendiri, tempat untuk istirahat berdekatan dengan akuarium ikan. Dari situ pengunjung bisa beristirahat sambil menikmati pemandangan ikan hias di akuarium. (*/vga)



Berawal dari Hobi Kini Jadi Pilot Drone Bersertifikat

KOTA-Ahmad Zaidit Taqwa hobi menerbangkan pesawat tanpa awak sejak kecil. Pemuda 19 tahun ini gandrung terhadap “mainan” itu sejak duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK).

Kini, hobi tersebut malah membawa berkah. Awalnya pemuda yang akrab disapa Memed itu mencari informasi tentang pesawat



tanpa awak melalui *YouTube*. Hingga akhirnya kesampaian membeli pesawat aeromodelling pada waktu masih SD.

Menurut pemuda asal Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo tersebut, pada waktu kelas 9 SMP, dia membeli drone FPV atau First Person View dengan menggunakan uang tabungannya milikinya.

Drone FPV merupakan jenis kendaraan udara tak berawak yang diterbangkan menggunakan umpan langsung. Yakni dari kamera di drone ke sepasang kaca mata atau monitor yang dikenakan oleh pilot.



merupakan daratan rawak bangunan video dikirimkan

“Setelah itu saya langsung gabung dengan komunitas. Akhirnya ada yang mulai menawarkan bekerja,” ujar Memed.

Semenjak gabung komunitas, imbuhnya, dia semakin mengerti cara menggunakan drone. Mulai cara mengambil video, hingga bagaimana gambar tetap stabil dengan pencahayaan yang berubah-ubah.

“Dari teman akhirnya banyak yang mengajak untuk mengikuti event,” ungkap Memed.

● Ke Halaman 10

MAHIR: Ahmad Zaidit Taqwa sering mengikuti event untuk menerbangkan drone.

Berawal dari Hobi...

Di antara event yang diikutinya F1H2O adalah yang terbesar. Yakni kompetisi balap internasional untuk perahu motor Formula 1 di Danau Toba pada Februari lalu.

Di sana Memed banyak mendapat pengalaman. Mulai dari komunikasi dengan pilot drone profesional yang berasal dari luar negeri.

"Saya juga minta video dari pilot drone dari negara lain untuk saya jadikan pelajaran," ucap Memed.

Dia mengaku menjadi pilot drone

paling muda di antara usia teman-teman komunitasnya. Namun, itu semua tidak membuatnya minder. Justru menjadi pemacu semangat untuk terus belajar agar menjadi semakin lebih baik.

"Teman-teman di komunitas rata-rata berusia 30 hingga 60 tahun. Saya tergabung dalam Sahabat FPV Sidoarjo," terangnya.

Berbagai pengalaman pahit pernah dirasakan oleh Memed. Mulai kehilangan drone akibat jatuh karena kehilangan sinyal, jatuh di air terjun, di laut, bahkan juga di pegunungan.

Tetapi kejadian tersebut tidak membuat dia putus asa.

Dengan kemampuannya menerbangkan pesawat tanpa awak dan ketrampilan merakitnya, Memed menjadi contoh untuk anak muda khususnya di Kabupaten Sidoarjo, untuk selalu memanfaatkan waktu dengan hal positif dan selalu berkreasi.

"Saya alhamdulillah mempunyai beberapa sertifikat, yakni salah satunya sertifikat International Islamic School Robot Olympiad, pada 2022," pungkasnya. (dik/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



AHMAD REZA/JAWA POS

KUAT: Jembatan apung yang menghubungkan Desa Bogempinggir, Balongbendo, dengan Desa Sumberrame, Wringinanom, Gresik.

Satu-satunya Jembatan Apung di Sidoarjo

SIDOARJO – Kini warga Desa Bogempinggir, Balongbendo, yang hendak menyeberang ke Desa Sumberrame, Wringinanom, Gresik, tidak perlu memutar terlalu jauh. Warga cukup melewati jembatan apung dengan lebar 2,5 meter dengan panjang 45 meter hasil kerja sama BUMDes dua desa tersebut. Mereka memanfaatkan lokasi yang dulu merupakan penyeberangan dengan perahu tambang.

"Pembuatannya selama sekitar dua minggu," ungkap Kades Bogempinggir Sutikno kemarin (18/6). Untuk membuat jembatan tersebut, dibutuhkan ratusan balok kayu dan 80 drum sebagai pelampung. Jembatan kelar dibikin pada 28 Mei, tetapi secara resmi bisa dilalui sejak 14 Juni.

Menurut Sutikno, sebelum ada jembatan tersebut, warga dari Balongbendo yang ingin menuju ke Wringinanom atau sebaliknya harus memutar 3 kilometer ke arah timur dengan menggunakan perahu tambang ataupun jembatan terdekat. "Sekarang bisa lebih cepat. Apalagi, banyak warga kami yang kerja di pergudangan daerah Wringinanom," jelasnya.

Jembatan apung di Bogempinggir, Balongbendo, ini juga cenderung efektif dan dinilai lebih aman. Jika arus deras, ada beberapa tali tambang besar yang disiagakan untuk dikencangkan.

"Kecenderungannya lebih aman karena bisa menyesuaikan ketinggian air di sungai ini," ujarnya.

Sutikno mengungkapkan, pembuatan jembatan tersebut dipicu kejadian yang memakan korban. Pada 2017, sempat ada perahu tambang di lokasi jembatan apung sekarang yang terkena musibah sehingga beberapa penumpangnya tercebur ke sungai.

Meski sudah bisa digunakan, jembatan apung itu akan diperbaiki lagi sehingga menjadi ikon bagi Desa Bogempinggir ataupun Desa Sumberrame. (eza/c14/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Balok Girder Flyover Krian di Atas Rel Terpasang Semua

SIDOARJO - Pengerjaan *flyover* pengganti JPL 64 Krian terus dikebut. Kini, balok *girder* di atas rel atau di Jalan Setiabudi seluruhnya sudah terpasang. Angga Syafrianto, pelaksana proyek *flyover* Krian, menjelaskan bahwa ada lima balok *girder* yang dipasang di atas rel kereta api.

Setelah *truss launcher* atau alat angkat khusus yang digunakan memasang *girder* terpasang pada 7 Juni lalu, pihaknya langsung mengerjakan pemasangan *girder* di titik tersebut. Sekitar dua minggu proses pemasangan, kini sudah tuntas.

Pemasangan balok *girder* lebih cepat dua hari dari target. Targetnya, terpasang besok (20/6). Dia menyatakan, setelah pemasangan *girder* tersebut, pihaknya melanjutkan pengerjaan di sisi selatan, yakni sisi barat Jalan Kyai Mojo. "Kami lanjutkan pengerjaan *erection* bentang setelah rel di sisi selatan," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUB-



TERPASANG MELINTASI REL KERETA: Kondisi terakhir proyek pembangunan flyover Krian, Sidoarjo, kemarin (18/6).

DIMAS MAULANA/JAWA POS

MSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono menyatakan, pengerjaan *flyover* Krian terbilang lancar. Karena itu, pihaknya optimistis akhir tahun nanti *flyover* sepanjang 700 meter itu bisa selesai. Saat ini progres *flyover* Krian sudah terbangun sekitar 70 persen lebih.

"Sebelum liburan Natal dan tahun baru, targetnya bisa selesai dan bisa dilalui," katanya. Dengan begitu, saat lalu lintas padat pada liburan akhir tahun, *flyover* Krian bisa digunakan. Selain pekerjaan utama yang dikerjakan, pihaknya juga menyiapkan

pengerjaan ornamen tambahan pada *flyover* Krian. Pihaknya merencanakan ada ikon atau ornamen khas Sidoarjo yang dipasang di *flyover* Krian. Pengerjaan sejumlah ornamen tersebut beriringan dengan *finishing* pengerjaan *flyover*. (uzi/c12/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pendapatan Rp 4,5 Triliun tapi 16,1% Anak Sidoarjo Idap Stunting, Suyarno: Ini Ironis

Admin

Friday, June 16, 2023, June 16, 2023 WIB



H. Suyarno, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo.



DNN, SIDOARJO – Meningkatnya angka pengidap stunting di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,3 persen hingga akhir 2022 lalu menjadi perhatian fraksi-fraksi di DPRD setempat. Perwakilan parpol di lembaga legislatif itupun menyampaikan berbagai pandangan dan pendapatnya terkait hal itu.

Ditemui usai mengikuti sidang paripurna DPRD Sidoarjo, Jumat (16/06/2023) sore tadi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suyarno menandakan partainya sangat peduli dengan masalah yang terkait dengan kualitas anak bangsa di masa depan tersebut.

Menurutnya sangat ironis sekali jika fakta tersebut sampai terjadi di kabupaten Sidoarjo. “Sumber pendapatan daerah kita ini sangat besar, Rp 4,5 triliun lebih lho. Tapi 16,1 persen anak-anak kita mengidap stunting. Menyedihkan sekali,” tandasnya.

Yang lebih membuatnya prihatin, tren pengidap stunting di kota delta justru mengalami peningkatan. Padahal angka stunting di tingkat Nasional dan Jawa Timur justru mengalami penurunan sebagaimana data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.

Secara nasional, pengidap stunting di seluruh Indonesia yang terdata hingga akhir 2022 lalu sebesar 21,6 persen. Grafiknya menurun jika dibandingkan dengan data serupa di akhir 2021 yang sempat mencapai 24,4 persen.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pun demikian dengan data serupa untuk wilayah Jawa Timur yang turun dari 23,5 persen pada 2021 menjadi 19,2 persen di 2022. “Kalau dilihat angka globalnya, pengidap stunting di Sidoarjo memang lebih kecil dibanding nasional maupun propinsi. Tapi ini bukan masalah angka, tapi tren kenaikannya itu lho yang bikin miris,” sebut Yarno lagi.

Karena itulah PDI Perjuangan sangat peduli dengan problematika tersebut. Salah satu bentuknya adalah kegiatan pemberian makanan tambahan yang bergizi tinggi bagi para balita di Kecamatan Waru yang dilakukan awal 2023 lalu.

Rencananya kegiatan semacam itu masih akan dilakukan lagi oleh parpol berlogo Banteng Moncong Putih tersebut di wilayah-wilayah kecamatan lainnya di kota delta, khususnya yang rekor kasus stuntingnya cukup tinggi.

Dari sisi politik, fraksinya juga terus mendesak Pemkab Sidoarjo untuk membuat konsep penanganan, pencegahan, penurunan angka stunting yang komprehensif dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait.



“Silahkan OPD-OPD itu mengajukan anggaran untuk penuntasan stunting. Pasti akan kami prioritaskan. Kalau memang perlu, ya ditambah dari dana yang ada saat ini,” tegas legislator asal Kecamatan Prambon akan akan kembali bertarung di Pemilu 2024 nanti itu.

Selain itu, Suyarno juga mendorong pemerintah desa untuk ikut serta mengalokasikan dana di APBDes guna mendukung program Pemerintah daerah Sidoarjo dalam perkara ini. “Aturan Permendes-nya khan memperbolehkan desa menganggarkan untuk stunting,” ucapnya lagi.

Sementara itu Ketua Fraksi Gerindra, Anang Siswandoko mendesak Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DP2CKTR) harus berkolaborasi dengan Perumda Delta Tirta terkait penyediaan air bersih untuk warga kota delta.

“Kami menginginkan percepatan pembangunan Spam-spam (sambungan pipa air minum-red) di wilayah yang belum terjangkau, sehingga dapat menekan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo,” sebut Anang saat membacakan materi Pandangan Umum (PU) fraksinya di forum sidang paripurna DPRD tersebut.*(pram/jalu)*





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sampaikan PU, Fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan Soroti Silpa APBD Sidoarjo

Admin

Friday, June 16, 2023, June 16, 2023 WIB



H. Anang Siswandoko, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DNN, SIDOARJO – Meski Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Sidoarjo 2022 telah mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan tetap memberikan sorotan terhadap hal itu.

Saat tampil sebagai juru bicara di Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda pembacaan Pandangan Umum (PU) fraksi terkait pertanggungjawaban bupati terhadap pelaksanaan APBD 2022, Ketua Fraksi Gerindra, Anang Siswandoko mengatakan Silpa sebesar Rp 494 Miliar itu terbilang cukup besar.

"Proporsinya terhadap dana tersedia masih berada di angka 9,3%. Padahal seharusnya batas yang wajar Silpa itu maksimal 5% dari dana tersedia," katanya. Karena itu fraksinya meminta Pemkab Sidoarjo meningkatkan lagi kualitas kebijakan agar antara perencanaan dengan penganggarannya lebih akurat.

Tak hanya itu, Gerindra juga meminta rencana penganggaran gaji, TPP dan TUKIN staf Pemkab Sidoarjo perlu dihitung lebih cermat untuk menekan Silpa. "Perencanaan kinerja harus memperhatikan output yang dihasilkan serta program kerja antar OPD harus saling berkesinngan," katanya.



Selanjutnya, Anang juga mempertanyakan besaran Silpa 2022 yang dibelanjakan kembali sesuai peruntukannya di tahun anggaran sekarang ini. "Apakah Saldo Anggaran lebih 2022 tersebut dapat menutup defisit APBD tahun berjalan 2023? Jika tidak cukup bagaimana solusinya?. Saya mohon penjelasan saudara Bupati!," ucapnya tegas.

Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan meminta agar SILPA Tahun 2022 yang ditempatkan di Bank Jatim diperjelas peruntukannya. "Berapa Silpa 2022 yang belum terikat penggunaannya sehingga bebas dipergunakan kembali untuk belanja pada Perubahan APBD tahun 2023," imbuh juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Sudjalil.

Selain itu, fraksi beranggotakan 10 orang anggota DPRD Sidoarjo tersebut juga menyoroti Silpa di Dinas Sosial yang menurut mereka masih cukup tinggi. Fakta itu dianggap sangat berbanding terbalik dengan masih banyaknya keluhan-keluhan di masyarakat terkait kinerja dinas tersebut.

Misalnya masalah bantuan makanan pada anak yatim, tidak adanya pembangunan Liponsos di tahun anggaran 2022 serta masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dalam pandangan F-PDI Perjuangan masih carut marut.

"Oleh karenanya kami meminta pada eksekutif untuk membuat terobosan agar bisa menjawab semua permasalahan warga miskin yang ada di Sidoarjo. Mohon jawaban Saudara Bupati!," ujar Sudjalil tegas.(pram/jalu)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Soal Kades yang Jadi Caleg, Komisi A Bakal Panggil Dinas PMD



dnnmedia.net 

Thursday, June 1, 2023, June 01, 2023 WIB



A. Haris, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo.

DNN, SIDOARJO - Selain politisi dari PDI Perjuangan-Bambang Riyoko, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, A Haris juga menyoroti terkait pengunduran diri lima kepada desa yang mencalonkan diri sebagai caleg dalam kontestasi pemilu 2024 nanti.



Menurutnya semestinya Bupati Sidoarjo, Akhmad Muhdlor segera menyikapi secara tegas terkait isu yang saat ini sedang berkembang di masyarakat tersebut. Misalnya- dengan memanggil ke lima kades aktif itu untuk memastikan pencalegannya.

"Ditanyai dulu mereka (lima kades-red) untuk mempertimbangkan secara matang tentang pencalegannya. Setelah itu bupati langsung memproses surat pengunduran diri dan memberhentikannya tanpa harus menunggu penetapan DCT (daftar calon tetap-red) SK pemberhentian itu dilayangkan," ujar politisi PAN ini.

Bendahara DPD PAN Sidoarjo itu juga menambahkan walaupun sudah membuat surat pengunduran diri untuk mendaftarkan sebagai caleg, namun para kades tersebut masih bisa menjalankan kewenangannya itu sebelum turunnya Surat Keputusan pemberhentian dari Bupati. Tentunya hal ini bertentangan dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

"Jangan sampai ada pembiaran pelanggaran. Saya mendorong Bupati segera memproses pengunduran diri kades-kades itu dan segera menunjuk Pj (penjabat-red) agar pelayanan di desa tidak terganggu," tambahnya.

Politisi asal Waru ini juga menandaskan apabila sampai minggu depan ini tidak ada progres terkait hal ini, maka komisi A akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan dalam rapat hearing.

"Kami akan panggil Kepala dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa-red), Kabiro hukum dan biro organisasi untuk menjelaskan isu yang berkembang di masyarakat ini," tandasnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Naik 1,3 Persen, FPDI-P Minta Pemkab Sidoarjo Serius Tangani Stunting

by Radar Jatim — 18 Juni 2023 in Politik



H. Suyarno, Ketua FPDI-P DPRD Kabupaten Sidoarjo.

16
VIEWS



SIDOARJO (RadarJatim.id) Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi *stunting* Kabupaten Sidoarjo sebesar 16,1 persen atau naik 1,3 persen dari tahun sebelumnya sebesar 14,8 persen.



H. Suyarno, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo merasa prihatin dengan adanya kenaikan angka stunting tersebut, Jum'at (16/06/2023) lalu.

Ia mengatakan bahwa selama ini pihaknya selalu mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan.

"Jujur saja, kami merasa prihatin dengan adanya kenaikan (angka, red) stunting di Kabupaten Sidoarjo," katanya.

Walaupun angka kenaikan stunting hanya 1,3 persen, namun secara nasional dan Jawa Timur (Jatim) justru terjadi penurunan. Dimana angka stunting secara nasional turun dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022.

Begitu pula di Jatim, terjadi penurunan angka stunting yang cukup signifikan sebesar 4,3 persen atau dari angka 23,5 persen pada tahun 2021 menjadi 19,2 persen pada tahun 2022.

"Kami berharap Pemkab (Sidoarjo, red) bisa menekan stunting di Kabupaten Sidoarjo, karena ini menyangkut masa depan anak cucu kita," ucapnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



H. Sudjalil, Sekretaris FPDIP DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Hal itu dipertegas oleh H. Sudjalil, Sekretaris FPDIP DPRD Kabupaten Sidoarjo bahwa Pemkab Sidoarjo harus segera melakukan penanganan yang lebih serius terhadap stunting dengan mencari penyebabnya.

Kemudian dicarikan solusi penanganannya, termasuk pencegahannya agar stunting di Kabupaten Sidoarjo tidak terus mengalami kenaikan, dan juga harus ditekan seminim mungkin dengan aksi nyata dilapangan.

“Jangan hanya sosialisasi-sosialisasi saja, namun juga dibarengi dengan aksi nyata,” tegasnya.

Aksi-aksi nyata, seperti perhatian kepada ibu hamil, tambahan makanan bergizi tinggi bagi ibu hamil dan balita maupun peningkatan ekonomi keluarga harus segera dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo.



Bahkan sarana dan prasarana penunjang harus dipenuhi, termasuk di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) seperti alat timbang bayi maupun meteran pengukur tinggi badan. "Jangan pakai timbangan beras atau kayu lagi," ungkapnya.

Ia menyadari bahwa upaya tersebut memang membutuhkan dukungan anggaran, maka dari itu pihaknya mempersilahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengajukan kebutuhan anggaran dalam penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo.

"Aturan membolehkan itu, silahkan mengajukan anggaran. Kalau untuk kepentingan masyarakat, pasti akan kami setuju," jelas politisi asal Kecamatan Krian itu.

Sebagai bentuk keseriusan dari FPDI-P terhadap permasalahan stunting ini, pada 23 Januari lalu, partainya mengadakan kegiatan di Posyandu diwilayah Kecamatan Waru yang berupa pemberian gizi balita.

"Kegiatan-kegiatan serupa akan terus kami galakkan di kecamatan-kecamatan lainnya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo, Fenny Apridawati saat ditemui usai mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo belum bersedia memberikan keterangan soal kenaikan angka stunting diwilayah Kabupaten Sidoarjo. **(mams)**





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO, MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1444 H

 Admin
June 19, 2023



**PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SIDOARJO**

Mengucapkan

**SELAMAT HARI RAYA
Idul Adha
1444 H
10 Dzulhijjah 1444 H**

Dengan Semangat Idul Adha 1444 H Mari Warga Sidoarjo
Berkurban dan Bekerja Keras demi Pemerataan Kesejahteraan

 Ketua H Usman M. Kes	 Wakil Ketua Bambang Riyoko, SE	 Wakil Ketua Kayan, SH	 Wakil Ketua Dr H Emir Firdaus, ST, MM
---	---	---	--

Sidoarjo, Metroliputan7.com.-



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO



Mengucapkan

Selamat Hari Raya
Idul Adha
1444 H

10 Dzulhijah 1444 H

Idul Qurban 1444 Kita Jadikan Momen untuk
Menunaikan ibadah kurban dan berbagi untuk sesama
mari Kita wujudkan Sidoarjo Makmur Sejahtera



Ketua
H Usman M. Kes

Wakil Ketua
Bambang Riyoko, SE

Wakil Ketua
Kayen, SH

Wakil Ketua
Dr H Emir Firdaus, ST, MM

Media Online Nasional
KHARISMANEWS.id
Profesional - Independen - Kompeten